

LAPORAN PENELITIAN
PEMAHAMAN PARA PENGAMBIL KEBIJAKAN
DI PERGURUAN TINGGI
terhadap
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS NO. 107/U/2001
tentang
PENYELENGGARAAN PTJJ

Oleh
Ida Malati Sadjati
Sri Kurniati



PUSAT STUDI INDONESIA
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TERBUKA
2005

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS TERBUKA



Lembar Pengesahan
Laporan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. a. Judul Penelitian : Pemahaman Para Pengambil Kebijakan di Perguruan Tinggi terhadap Surat Keputusan Mendiknas No. 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan PTJJ
b. Bidang Penelitian*) : Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ)
c. Klasifikasi Penelitian**) : Penelitian Kebijakan
d. Bidang Ilmu***) : -

2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap & Gelar : drh. Ida Malati Sadjati, M.Ed
b. NIP : 131569969
c. Golongan Kepangkatan : III/d
d. Jabatan Akademik : Lektor
e. Fakultas/Unit Kerja : FMIPA/PAU-PPI-LPPM

3. Anggota Peneliti
a. Jumlah Anggota : 1 (satu) orang
b. Nama Anggota/Unit Kerja : 1. Dra. Sri Kurniati, M.Si / PPBANC - LPBAUSI
2.
3.

4. a. Periode Penelitian : Januari – Desember 2004
b. Lama Penelitian : 12 bulan

5. Biaya Penelitian : Rp. 6.100.000,-
(Enam juta seratus ribu rupiah)

6. Sumber Biaya : UT

Pondok Cabe, April 2005

Mengetahui
Dekan/Kepala UPBJJ

Dr. Yuni Tri Hewindati
NIP. 131644274

Menyetujui,
Pembimbing,
(jika ada)

NIP.

Ketua Peneliti.

drh. Ida Malati Sadjati, M.Ed
NIP. 131569969

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat

Agus Joko Purwanto
NIP. 132002049

Menyetujui,
Kepala Pusat Keilmuan

Durri Andriani
NIP. 131569965

-
- * Bidang Penelitian diisi dengan Bidang Ilmu, Kelembagaan, Media dan Teknologi, PTJJ (pilih salah satu)
** Klasifikasi Penelitian (diisi dengan Penelitian Mula, Penelitian Madya, Penelitian Mandiri, Penelitian Kebijakan)
*** Bidang Ilmu (dicantumkan bila perlu)

ABSTRAK

Sejak dikeluarkan Surat Keputusan Mendiknas No. 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan PTJJ, Universitas Terbuka tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan sistem jarak jauh.

Surat Keputusan ini merupakan jawaban dari pemerintah terhadap beberapa perguruan tinggi (PT) yang menyelenggarakan sistem pendidikan kelas jauh tetapi menyatakan bahwa sistem kelas jauh itu adalah sistem pendidikan jarak jauh. Dalam ini tertera cara untuk menyelenggarakan Sistem PTJJ (SPTJJ) sekaligus membuka peluang untuk menyelenggarakan SPTJJ.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman para pengambil kebijakan di PT terhadap Mendiknas No. 107/U/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTJJ. Metode penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif korelasional* dengan *Stratified Random Sampling*, sementara analisis data dilakukan dengan cara deskripsi dan dihitung korelasinya dengan cara statistik. Namun dari hasil analisis statistik tidak diperoleh korelasi yang signifikan sehingga analisis data dibuat dengan cara perbandingan prosentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pengambil kebijakan di PT memiliki dan peduli terhadap Kepmen No.107/4/2003. Secara umum, isi Kepmen dipahami dengan baik oleh mereka yang memiliki dan peduli terhadap Kepmen, tetapi persentasenya sangat kecil, yakni 33.33% dari responden. Walau tidak ditemukan perbedaan tingkat pemahaman yang signifikan antara pengelola PT di tingkat rektorat, fakultas, dan jurusan, tetapi terlihat kecenderungan penurunan tingkat pemahaman antar ketiganya. Di samping itu, tidak ditemukan juga perbedaan tingkat pemahaman antar para pengambil kebijakan di PT pada saat dikategorikan berdasarkan jabatan struktur, golongan, fakultas, dan lokasi PT. Namun, terdapat kecenderungan penurunan tingkat pemahaman antar responden dalam satu kategori, misal responden golongan IV lebih tinggi tingkat pemahamannya daripada responden golongan III. Dalam hal peran, sebagian besar responden mengatakan bahwa Kepmen baru sebatas memberi rambu-rambu umum tentang penyelenggaraan PTJJ, tapi belum berperan dalam mengatur secara teknis operasional penyelenggaraan PTJJ. Tentang peran Kepmen terhadap rencana PT menyelenggarakan PTJJ, terlihat bahwa sebagian besar responden tidak memiliki rencana yang jelas untuk menyelenggarakan PTJJ. Bagi sebagian yang sudah memiliki rencana, setelah ditelusuri rencana itu baru sebatas rencana, wacana dan ide.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Judul	1
2. Latar Belakang	1
3. Rumusan Masalah	4
4. Tujuan	4
5. Manfaat Hasil	5
BAB II. METODOLOGI	6
1. Metode Penelitian	6
2. Variabel Penelitian	6
3. Alat Ukur dan Pengukuran	7
4. Lokasi Penelitian	7
5. Populasi dan Sampel	7
6. Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data	9
BAB III. TINJAUAN PUSTAKA	10
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	19
Potret tentang Pemahaman	19
A. Keberadaan dan Kepemilikan Kepmen No.107/U/2001	19
B. Pemahaman tentang isi Kepmen Mendiknas No.107/U/2001	21
1. Pemahaman tentang Pengertian PTJJ	22
2. Pemahaman tentang Tujuan PTJJ	23
3. Pemahaman tentang Syarat Penyelenggaraan PTJJ	23

4. Pemahaman tentang Penyelenggaraan PTJJ	24
5. Pemahaman tentang Kurikulum PTJJ	24
6. Pemahaman tentang Materi Ajar PTJJ	25
7. Pemahaman tentang Media dan Metode dalam PTJJ	25
8. Pemahaman tentang Belajar Mandiri dalam PTJJ	26
9. Pemahaman tentang Praktek dan Praktikum	26
10. Pemahaman tentang Pematapan Pengalaman Lapangan	27
11. Pemahaman tentang Layanan Bantuan Belajar	27
12. Pemahaman tentang Evaluasi Hasil Belajar	27
13. Pemahaman tentang Unit Sumber Belajar	27
C. Perbedaan Tingkat Pemahaman Para Pengambilan Kebijakan di Perguruan Tinggi Dilihat dari Perbedaan Jabatan Struktural, Golongan, Kategori Fakultas, Lokasi PT, Serta Perbedaan Jenis Kelamin Terhadap Isi KEPMEN No. 107/U/2001	29
D. Peran Kepmen No.107/U/2001 dalam Membantu Perguruan Tinggi Berbasis Kampus Menyelenggarakan PTJJ	36
E. Rencana Perguruan Tinggi Berbasis Kampus Menyelenggarakan PTJJ...	44
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	 46
1. Kesimpulan	46
2. Saran	47
 DAFTAR PUSTAKA	 49
 LAMPIRAN	 50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Proporsi Tingkat Pengembalian Kuesioner Berdasarkan Kelompok Pengambil Keputusan Dan Asal Instansi	8
Tabel 2.	Distribusi Pengembalian Kuesioner Berdasarkan Kelompok Pengambil Keputusan	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Keberadaan, Kepemilikan Dan Kepedulian Responden terhadap Kepmen	19
Gambar 2.	Tingkat Pemahaman Responden terhadap Isi Kepmen	22
Gambar 3.	Kejelasan Kepmen Menurut Kategori Struktural	30
Gambar 4.	Kejelasan Kepmen Menurut Kategori Golongan	32
Gambar 5.	Kejelasan Kepmen Menurut Kategori Lokasi	33
Gambar 6.	Kejelasan Kepmen Menurut Kategori Fakultas	34
Gambar 7.	Kejelasan Kepmen Menurut Kategori Gender	35
Gambar 8.	Peranan Kepmen Terhadap Penyelenggaraan PTJJ Menurut Kategori Lokasi	37
Gambar 9.	Peranan Kepmen Terhadap Penyelenggaraan PTJJ Menurut Kategori Fakultas	39
Gambar 10.	Peranan Kepmen Terhadap Penyelenggaraan PTJJ Menurut Kategori Gender	40
Gambar 11.	Peranan Kepmen Terhadap Penyelenggaraan PTJJ Menurut Kategori Golongan	41
Gambar 12.	Peranan Kepmen Terhadap Penyelenggaraan PTJJ Menurut Kategori Struktural	43
Gambar 13.	Rencana PT menyelenggarakan PTJJ	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner: Pemahaman Para Pengambil Kebijakan di Perguruan Tinggi terhadap Keputusan Mendiknas No. 107/U/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTJJ (PTJJ)	50
Lampiran 2. Daftar Perguruan Tinggi Responden	60

BAB I. PENDAHULUAN

1. Judul Penelitian: Pemahaman Para Pengambil Kebijakan di Perguruan Tinggi (Pengelola PT, Pengelola Fakultas, dan Pengelola Jurusan/Program Studi) Terhadap Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 107/U/2001 Tentang Penyelenggaraan PTJJ.

2. Latar Belakang

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa *setiap orang berhak memperoleh kesempatan untuk belajar dan mendapatkan pendidikan sepanjang hayatnya* (UNESCO, 1996). Sementara Undang Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa *negara mempunyai komitmen terhadap pendidikan untuk pembangunan bangsa Indonesia*, maka sudah selayaknya pendidikan di Indonesia berkembang dengan baik. Dalam kenyataannya, masih banyak kendala yang menghambat realisasi Deklarasi UNESCO dan amanat UUD 1945 tersebut. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumberdaya, baik manusianya maupun dana; luasnya wilayah Indonesia; tersebarnya penduduk Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di kota-kota sampai dengan pedesaan; dan terbatasnya sistem pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk melayani pendidikan bagi banyak orang yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Dipicu oleh kendala yang ada serta adanya tuntutan terhadap pengembangan manusia pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat pada semua level pendidikan. Pada saat bersamaan, lahir berbagai inovasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi pendidikan serta teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut mendorong berbagai upaya untuk mempercepat dan menyerasikan pertumbuhan kuantitatif dengan peningkatan kualitatif pendidikan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya dengan tersedianya fasilitas satelit yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi, telah melahirkan berbagai alternatif sistem pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa. Menyadari kenyataan tersebut, pada tahun 1984 pemerintah Indonesia mendirikan Universitas Terbuka (UT) yang bertujuan memperluas akses lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) untuk mengenyam pendidikan tinggi yang dari tahun ke tahun meningkat terus.

Penyelenggaraan pendidikan di UT sepenuhnya menggunakan Sistem Belajar Jarak Jauh (SBJJ). Dengan sistem pendidikan semacam ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan belajar yang beragam untuk mahasiswa. Hal ini dimungkinkan karena dalam SBJJ tidak ada pertemuan tatap muka. Proses pembelajaran dalam SBJJ difasilitasi oleh media pembelajaran yang dikemas sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa dapat menentukan sendiri kapan, dimana, dan dengan strategi apa mereka melakukan proses pembelajaran.

Seiring dengan beroperasinya UT, perguruan tinggi yang berbasis kampus pun mulai memperluas pasarnya dengan mengembangkan program-program pendidikan yang dilaksanakan di luar kampus. Perguruan tinggi tersebut meng'*claim*' dirinya menggunakan *dual mode of education system*, yaitu kombinasi pendidikan tatap muka dan PTJJ (PTJJ). Tetapi apa yang terjadi dalam prakteknya? Bukan sistem PTJJ yang diterapkan, tetapi praktek kelas jauh. Hal ini terbukti dari proses pembelajaran yang dilakukan, yaitu tetap menggunakan pola tatap muka dan bahan ajar yang digunakan pun buku teks, *hand-out*, makalah, dll. yang dikembangkan untuk kepentingan pembelajaran tatap muka. Perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut mengakui menyelenggarakan PTJJ hanya karena pelaksanaan perkuliahannya tidak dilakukan di dalam kampus tetapi di suatu tempat di luar kota, di tempat mahasiswa berada. Konsekwensinya, dosen program kelas jauh bertindak sebagai dosen terbang, yaitu dosen datang ke tempat mahasiswa berada, bukan mahasiswa yang datang ke kampus untuk kuliah. Di samping itu, hal lain yang di '*claim*' sebagai ciri PTJJ alias kelas jauh adalah pemadatan jadwal perkuliahan. Misalnya, materi perkuliahan delapan sesi yang secara normal perlu disampaikan dalam empat kali pertemuan, dalam kelas jauh disampaikan dalam satu kali pertemuan, dalam satu hari.

Walaupun kualitas pembelajaran praktek kelas jauh ini banyak dipertanyakan tetapi dalam kenyataannya praktek kelas jauh ini semakin hari semakin menjamur, banyak diminati masyarakat dan dilakukan hampir segala jenis perguruan tinggi, dari perguruan tinggi negeri, sampai perguruan tinggi swasta; dan dilakukan oleh perguruan tinggi ternama di perkotaan sampai dengan perguruan tinggi gurem di daerah pinggiran.

Ketika ditanya alasan pembukaan kelas jauh, pada umumnya perguruan tinggi beralasan bahwa kelas jauh dibuka karena adanya kebutuhan masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi di satu sisi sementara di sisi lain masyarakat memiliki keterbatasan waktu, tempat, dan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi tatap muka. Oleh sebab itu, praktek kelas jauh dianggap sebagai salah satu solusi yang dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat tersebut.

Pembelajaran kelas jauh pada umumnya memiliki karakteristik seperti perkuliahan hanya dilakukan dua hari dalam seminggu, hari Sabtu dan Minggu; perkuliahan dilakukan di kota mahasiswa, serta proses perkuliahan dipadatkan, yang memungkinkan mahasiswa dapat lebih cepat menyelesaikan perkuliahan.

Melihat fakta seperti itu pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, mengkhawatirkan akan terjadinya penurunan kualitas lulusan pendidikan tinggi secara umum. Perkuliahan yang dilakukan secara kontinyu saja belum dapat menjamin bagusnya mutu lulusan, apalagi yang kegiatan perkuliahannya dipadatkan.

Untuk menghindari semakin maraknya praktek kelas jauh ini, diikuti dengan semakin kencangnya desakan masyarakat terhadap demokratisasi dan otonomi pendidikan, maka pada tahun 2001 pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional, membuka kesempatan kepada perguruan tinggi tinggi tatap muka untuk menyelenggarakan PTJJ secara resmi dengan menerbitkan Surat Keputusan Mendiknas no. 107/U/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTJJ. Dengan terbitnya KEPMEN tersebut, diharapkan praktek-praktek kelas jauh dihentikan dan digantikan oleh Sistem PTJJ yang penyelenggaraannya resmi dan direstui pemerintah. Dengan demikian, perguruan tinggi tatap muka yang

berminat untuk menawarkan program PTJJ, tidak perlu ragu-ragu lagi untuk melakukannya, semua sudah jelas aturan mainnya.

3. Rumusan Masalah

Menjamurnya praktek kelas jauh yang dilakukan beberapa perguruan tinggi di tanah air mengindikasikan adanya kekurangpahaman para pengambil kebijakan di perguruan tinggi mengenai prosedur penyelenggaraan sistem PTJJ. Akibatnya mereka menganggap praktek kelas jauh sama dengan sistem PTJJ.

Salah satu penyebab kekurangpahaman tersebut diasumsikan karena belum adanya Pedoman Penyelenggaraan PTJJ. Terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 107/U/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTJJ diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut.

4. Tujuan

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman para pengambil kebijakan di perguruan tinggi tatap muka terhadap Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 107/U/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTJJ.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman para pengambil keputusan di perguruan tinggi tatap muka terhadap:

- A. Keberadaan dan Kepemilikan KEPMEN Mendiknas No.107/U/2001
- B. Pemahaman tentang isi Kepmen Mendiknas No.107/U/2001, yang meliputi:
 1. Pengertian Sistem Penyelenggaraan PTJJ (PTJJ).
 2. Tujuan PTJJ
 3. Syarat penyelenggaraan PTJJ
 4. Penyelenggaraan PTJJ
 5. Kurikulum dalam PTJJ
 6. Materi Ajar PTJJ
 7. Media dan Metode dalam PTJJ
 8. Belajar Mandiri dalam PTJJ
 9. Praktik dalam PTJJ
 10. Praktikum dalam PTJJ
 11. Pemantapan Pengalaman Lapangan dalam PTJJ
 12. Layanan Bantuan Belajar dalam PTJJ
 13. Evaluasi Hasil Belajar dalam PTJJ
 14. Unit Sumber Belajar dalam PTJJ

- C. Perbedaan Tingkat Pemahaman Para Pengambilan Kebijakan Di Perguruan Tinggi Dilihat Dari Perbedaan Jabatan Struktural, Golongan, Kategori Fakultas, Lokasi PT, Serta Perbedaan Jenis Kelamin Terhadap Isi KEPMEN No. 107/U/2001
- D. Peran KEPMEN No.107/U/2001 Dalam Membantu Perguruan Tinggi Tatap Muka Menyelenggarakan PTJJ
- E. Rencana Perguruan Tinggi Tatap Muka Menyelenggarakan PTJJ.

5. Manfaat Hasil

Hasil temuan dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam membenahan dan pengembangan sistem PTJJ di Indonesia. Secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat :

1. Menunjukkan data tentang kesiapan dan rencana perguruan tinggi tatap muka dalam mengembangkan PTJJ, selain pendidikan tatap muka yang telah dilakukannya selama ini.
2. Menjadi masukan bagi pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, dalam pengembangan sistem pembelajaran dan manajemen PTJJ.
3. Menjadi masukan bagi UT pada saat merencanakan membentuk jaringan kerja sama antar perguruan tinggi.
4. Bahan pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam merancang dan mengembangkan sistem PTJJ.

BAB II. METODOLOGI

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif korelasional. Data dideskripsikan kemudian dihitung korelasinya secara statistik. Namun dari hasil analisis statistik tidak diperoleh korelasi yang signifikan sehingga analisis data dibuat dengan melihat perbandingan persentase.

2. Variabel Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian maka variabel-variabel dalam penelitian ini adalah Surat Keputusan Mendiknas No 107/U/2001 dan pemahaman pengambil kebijakan di perguruan tinggi.

Variabel bebas adalah Keputusan Mendiknas No 107/U/2001 yang dalam hal ini dijabarkan menjadi: keberadaan dan kepemilikan dokumen Kepmen; pemahaman tentang isi Kepmen yang dirinci menjadi: pengertian tentang sistem pembelajaran, tujuan, syarat penyelenggaraan, penyelenggaraan, kurikulum, materi ajar, media dan metode, belajar mandiri, praktik dan praktikum, pemantapan pengalaman lapangan, layanan bantuan belajar, evaluasi hasil belajar, dan unit sumber belajar dalam PTJJ; perbedaan tingkat pemahaman; peran Kepmen bagi perguruan tinggi tatap muka dalam membantu penyelenggaraan PTJJ; dan rencana perguruan tinggi tatap muka menyelenggarakan PTJJ.

Variabel terikat dalam studi ini adalah pemahaman para pengambil keputusan PT. Dalam penelitian ini para pengambil keputusan dikategorikan berdasarkan: jabatan struktural, yakni: Pengelola PT (Rektor dan Pembantu Rektor), Pengelola Fakultas (Dekan dan Pembantu Dekan) dan Pengelola Jurusan (Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Dosen); golongan, yang dibedakan atas golongan III dan golongan IV; lokasi PT, dibagi dalam Jawa dan Luar Jawa; fakultas dibedakan atas eksak dan

non eksak; serta gender yaitu para pengambil kebijakan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

3. Alat Ukur dan Pengukuran

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang butir pertanyaannya diukur dalam skala Likert dan pilihan jawaban ya dan tidak. Skala Likert disajikan dalam bentuk angka 1 sampai 4 yang diartikan mulai dari: sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju.

4. Lokasi Penelitian

PT yang dijadikan sampel kuesioner adalah PTN dan PTS yang berlokasi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan pendapat yang signifikan antara para pengambil kebijakan di PT dalam Jawa dan luar Jawa, mengingat pola pertukaran informasi di dalam dan di luar Jawa agak sedikit berbeda. Kuesioner dikirimkan kepada 25 PT, yang terdiri atas: 19 PTN dan 6 PTS. Dari 25 PTN dan PTS ini, 11 berlokasi di Pulau Jawa dan 14 berlokasi di luar Pulau Jawa, yaitu: Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan.

5. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah para pengambil keputusan dari 25 PTN dan PTS yang berlokasi di pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Sedangkan sampel penelitian ditentukan secara *stratified random sampling*. Dari setiap PT dipilih 8 responden, yaitu: 2 responden (Rektor dan Pembantu Rektor I) untuk kategori pengelola PT, 4 responden (2 Dekan dan 2 Pembantu Dekan I) untuk kategori pengelola fakultas, 2 responden (2 Ketua Jurusan) untuk kategori pengelola jurusan. Para pengambil kebijakan pada level perguruan tinggi yang dijadikan responden adalah Rektor dan Pembantu Rektor Bidang Akademik karena masalah pembukaan program studi dan penyelenggaraannya merupakan bidang tugas Pembantu Rektor Bidang Akademik. Demikian pun pada level fakultas, responden yang dimintai pendapatnya tentang Mendiknas tentang pedoman

penyelenggaraan PTJJ adalah Pembantu Dekan Bidang Akademik, Ketua dan Sekretaris Jurusan, serta Ketua Program Studi, karena mereka yang sehari-harinya bergelut dengan masalah akademik.

Secara keseluruhan, jumlah sampel: 25 PT x 8 responden = 200 responden. Rekapitulasi data pengiriman dan pengembalian berdasarkan lokasi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Proporsi Tingkat Pengembalian Kuesioner Berdasarkan Kelompok Pengambil Keputusan dan Asal Institusi

No.	Pengelola PT	Jumlah								
		Jawa			Luar Jawa			Total		
		Kirim (N)	Kembali		Kirim (N)	Kembali		Kirim (N)	Kembali	
N	%		N	%		N	%			
1.	Rektorat	22	3	3.4	28	5	4.5	50	8	4.0
2.	Fakultas	44	42	47.7	56	66	58.9	100	108	54.0
3.	Jurusan	22	3	3.4	28	11	9.8	50	14	7.0
4.	Lain-lain (misalnya: BAUK, BAAK)		3	3.4		2	1.8		5	2.5
Total		88	51	57.9	112	84	75.0	200	135	67.5

Pada tabel terlihat bahwa kelompok fakultas dari luar Jawa mengembalikan kuesioner lebih banyak daripada kuesioner yang dikirimkan. Hal ini kemungkinan disebabkan fakultas memperoleh tugas untuk mengisi kuesioner dari pihak rektorat atau kuesioner yang seharusnya diisi oleh jurusan diisi oleh pejabat di level fakultas.

Sedangkan data pengiriman dan pengembalian berdasarkan kelompok pengambil keputusan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Distribusi Pengembalian Kuesioner Berdasarkan Kelompok Pengambil Keputusan

No.	Pengelola PT	Golongan									Total		
		III			IV			Lain-lain			L	P	Total
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total			
1.	PT	2	-	2	6	-	6	-	-	-	8	-	8
2.	Fakultas	9	-	9	87	7	94	4	1	5	100	8	108
3.	Jurusan	3	2	5	6	3	9	-	-	-	9	5	14
4.	Lain-Lain	1	1	2	2	1	3	-	-	-	3	2	5
Total		15	3	18	101	11	112	4	1	5	120	15	135

6. Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengumpulan kuesioner.

Prosedur selengkapnya adalah:

- Penyusunan instrumen (kuesioner).
- Identifikasi populasi.
- Pemilihan responden secara *stratified random sampling*.
- Uji coba kuesioner, yang dimaksudkan untuk menguji keterbacaan kuesioner (*face validity*).
- Pengiriman kuesioner.
- Penerimaan kuesioner.
- Coding.
- Entry data.
- Analisis data.
- Penulisan draft laporan.
- Finalisasi laporan.
- Penggandaan dan penjilidan laporan.

Dari data yang diperoleh dilakukan perhitungan untuk melihat frekuensi dan disajikan secara deskriptif. Selanjutnya dilakukan uji korelasional untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat (pemahaman para pengambilan keputusan) dengan variabel bebas (tingkat pemahaman tentang sistem pembelajaran PTJJ). Dari hasil analisis statistik tidak diperoleh korelasi antar variabel dengan demikian penyajian secara deskriptiflah yang dibahas dalam Laporan ini.

BAB III. TINJAUAN PUSTAKA

PTJJ (PTJJ) dapat didefinisikan, baik secara universal maupun kontekstual. Secara universal, PTJJ dapat diartikan sebagai pendidikan yang didasarkan pada keterpisahan antara mahasiswa dan pengajar dalam ruang dan waktu, pemanfaatan (paket) bahan belajar yang dirancang dan diproduksi secara sistematis, adanya komunikasi yang tidak terus menerus (*non-contagius*) antara mahasiswa dengan mahasiswa, tutor, dan organisasi pendidikan melalui beragam media, serta adanya penyeliaan dan pemantauan yang intensif dari suatu instansi pendidikan (Pannen dalam Belawati, 1999).

Holmberg (dalam Suparman, 1996) memandang PTJJ dari segi proses mahasiswa yang belajar dengan hanya mendapatkan sedikit supervisi dari tutor. Ia mendefinisikan PTJJ sebagai berbagai bentuk studi pada semua tingkatan yang tidak berada di bawah atau segera mendapatkan supervisi dari para tutor seperti halnya pengajaran dalam ruangan kelas, tetapi tetap mendapatkan keuntungan dari perencanaan dan bimbingan dari organisasi tutorial.

Schram (1981) memandang PTJJ dari segi penggunaan media komunikasi dan peranannya dalam memperluas kesempatan belajar dan dalam menyebarkan keahlian mengajar. Ia berpendapat bahwa PTJJ adalah pengajaran yang menggunakan media komunikasi untuk memperluas kesempatan belajar di luar ruang kelas dan kampus, sehingga dimungkinkan terjadinya penguasaan keahlian mengajar secara lebih luas dibandingkan dengan apa yang dapat dilakukan oleh dosen atau sekolah mana pun. Jadi penerapan PTJJ dapat memungkinkan orang-orang yang ingin belajar, untuk belajar dimana saja mereka berada, tanpa memandang umur, pekerjaan, atau jarak dari pusat belajar.

MacKenzie, Postage, dan Schupam (1975) menjelaskan pengertian PTJJ dari segi misinya. Para pakar ini berpendapat bahwa PTJJ adalah suatu ide dalam menciptakan kesempatan belajar bagi orang-orang yang terhalang untuk memasuki sekolah biasa, dikarenakan berbagai alasan, seperti keterbatasan memperoleh pendidikan formal, keterbatasan lowongan tempat duduk, keterbatasan biaya, tinggal di daerah terpencil, bekerja, dan lain-lain.

Motik (1989) mengutip pendapat Dohmen yang mengatakan bahwa PTJJ adalah bentuk belajar mandiri yang terorganisasi secara sistematis, dimana bimbingan kepada mahasiswa dilakukan oleh satu tim pengajar yang masing-masing mempunyai tanggung jawab tertentu.

Moore and Kearsley (1996) mendefinisikan PTJJ sebagai proses belajar yang terencana, yang secara normal terjadi di tempat terpisah dari tempat pengajar. Konsekuensi dari kondisi tersebut, maka diperlukan teknik-teknik khusus dalam hal perancangan matakuliah, strategi pembelajaran, metode komunikasi yang memanfaatkan saluran elektronik dan teknologi canggih lainnya, serta pengaturan yang baik dalam hal pengelolaan dan administrasi.

Secara kontekstual, PTJJ dapat diartikan berdasarkan karakteristiknya masing-masing dan diberi nama sesuai dengan implementasi dari konsep PTJJ sendiri. Contoh pengertian PTJJ secara kontekstual diantaranya adalah *correspondence study*, *individualized learning*, *independent study*, *tele-education* dan istilah terakhir yang sedang populer saat ini untuk PTJJ adalah *e-learning*.

PTJJ sebagai *correspondence study* pertama kali dikemukakan oleh MacKenzie, Christensen dan Rigby (dalam Keegan, 1986). *Correspondence study* diartikan sebagai suatu metode pembelajaran yang menggunakan korespondensi sebagai alat komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Komunikasi ini harus difasilitasi melalui bahan cetak, media elektronik, dan media lain (Moore, 1973).

PTJJ dikatakan pula sebagai *individualized learning* karena sistem ini menempatkan mahasiswa sebagai fokus dari segala proses belajar dan proses mengajar. Mahasiswa berinisiatif dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan proses belajarnya. Mereka dapat menentukan sendiri berbagai hal yang berkaitan dengan belajarnya, seperti: apa yang akan dipelajari, dimana dan kapan waktu belajar yang paling kondusif, dengan cara bagaimana belajarnya, menggunakan apa saja selama belajar, serta mereka dapat mengukur kinerja mereka sendiri, apabila diperlukan dan dikehendaki (Pannen dalam Belawati, 1999).

Berdasarkan definisi-definisi yang ada, Keegan (1980) mengemukakan karakteristik PTJJ adalah sebagai berikut :

1. adanya keterpisahan antara dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran;

2. adanya pengaruh dari institusi penyelenggara sehingga membedakannya dengan belajar sendiri di rumah (*home study*);
3. adanya pemanfaatan media yang beragam, baik elektronik maupun non-elektronik;
4. tersedianya fasilitas komunikasi dua arah;
5. adanya pertemuan yang tidak terlalu sering, baik untuk kepentingan belajar kelompok maupun sosialisasi; dan
6. adanya proses pengelolaan yang mirip dengan manajemen di dunia industri.

Sistem PTJJ sudah sangat menyebar di seluruh dunia. Ada yang secara murni menyelenggarakan *single mode* sistem PTJJ, seperti UT, tetapi ada juga yang menerapkan *dual mode*, seperti Deakin University di Australia. Masing-masing institusi memiliki alasan yang unik pada saat memutuskan menerapkan sistem PTJJ dalam mengelola kegiatan pendidikannya. Tujuan utama penyelenggaraan PTJJ di negara maju adalah untuk menyediakan pendidikan bagi para individu mahasiswa yang menginginkan pendidikan pada berbagai tingkatan dan juga melayani beragam kebutuhan individual. Sementara di negara berkembang, PTJJ dilaksanakan sebagai usaha kolektif untuk membangun bangsa, melenyapkan buta aksara, mengembangkan daerah pedesaan, dan melaksanakan pendidikan kesehatan, pendidikan perempuan, pendidikan untuk suku-suku terbelakang, pendidikan untuk kelompok sosial kelas bawah, disamping untuk mengembangkan keterampilan akademis, teknis, dan kejuruan. Tujuan yang sangat besar seperti ini membuat pelaksanaan pendidikan menjadi rumit dan penuh tuntutan. Ini menyulitkan implementasi sistem PTJJ di negara berkembang.

PTJJ sering diidentikkan dengan pendidikan orang dewasa, tetapi identifikasi semacam itu tidak sepenuhnya benar. Saat ini, sistem PTJJ sudah diterapkan untuk berbagai jenis program pendidikan untuk berbagai kalangan masyarakat, dari anak-anak, remaja, sampai dengan orang dewasa; dari mulai pendidikan dasar, menengah, dan sampai dengan pendidikan tinggi (Sherry, 1996). Kurikulum, program, dan beban PTJJ tidak saja disamakan sistemnya, tetapi sudah disetarakan pula dengan pendidikan tatap muka biasa.

PTJJ mengubah pola pembelajaran, dari model sekolah umum yang pengelolaannya sangat terpusat (*centralized*), ke model sekolah yang lebih lentur (*flexible*) yang pengelolaannya dilakukan setempat di daerah (*decentralized*). Keadaan ini membalikan dinamika sosial yang ada selama ini, yaitu meminta mahasiswa datang ke

sekolah tetapi membawa sekolah kepada mahasiswa. Hal ini mengharuskan pengelola PTJJ untuk mempertimbangkan hal-hal berikut dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu:

- mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan pendidikan berbasis elektronik terhadap masa kerja dosen
- menyeimbangkan anggaran dengan memilih sarana dan prasarana elektronik yang potensial tetapi berharga ekonomis
- mendefinisikan kembali arti kehadiran dosen di kelas.
- memperbaiki persyaratan rekrutmen dosen, tidak saja hanya mampu dalam bidang studi dan terampil mengelola pembelajaran, tetapi juga harus mampu mengoperasikan teknologi canggih yang dimanfaatkan dalam PTJJ.
(Holloway & Ohler, 1991, dalam Sherry, 1996).

Kalau diamati dengan seksama karakteristik PTJJ maka PTJJ bagaikan suatu perusahaan gabungan karena dalam PTJJ ditemukan adanya integrasi antar berbagai bidang pekerjaan yang sangat besar, yang bekerja secara sinergi untuk mencapai satu tujuan. Sehubungan dengan itu kebijakan baru dalam mengelola PTJJ harus diarahkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan karakteristiknya tersebut. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam mengelola PTJJ diantaranya adalah perlu dikembangkannya :

- bentuk penilaian dan evaluasi hasil belajar yang baru, termasuk strateginya, yang dapat memastikan bahwa hasil kerja mahasiswa betul-betul orisinal dan otentik,
- satu set standar akreditasi institusi yang diakui secara nasional, yang dapat menjamin kualitas PTJJ,
- satu set standar kualifikasi dosen yang berlaku secara nasional, yang memenuhi kriteria minimal, termasuk didalamnya pelatihan teori PTJJ, metode dan strategi PTJJ,
- kerjasama yang saling menguntungkan antar dunia bisnis, pemerintah, dan sektor pendidikan,
- pelatihan teknologi dan aksesibilitasnya untuk semua, bukan hanya bagi mahasiswa dan dosen yang maju dan aktif saja.

Keunikan karakteristik PTJJ membutuhkan juga keunikan dalam merancang pola atau metode yang sesuai untuk mengimplementasikannya. Baley dan Cowell (dalam Moore, 1990) berpendapat bahwa dikarenakan konsep pengelolaan PTJJ sangat berlainan dengan pendidikan tatap muka, maka dibutuhkan keterampilan manajemen program yang baru. Keterampilan manajemen dimaksud diantaranya adalah keterampilan menentukan garis tanggungjawab; memperoleh dan mengelola dana; melakukan

perencanaan program yang terarah; mensupervisi mahasiswa; mengadakan, mengelola, dan memperbaiki peralatan; melakukan penjadwalan kelas, dan lain-lain. Akibatnya, manajemen PTJJ menyerupai manajemen untuk dunia industri dan bisnis.

Dalam sistem PTJJ terdapat keterpisahan antara dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dimediasi oleh adanya pemanfaatan media yang beragam, baik elektronik maupun non-elektronik. Dengan demikian, materi pelajaran serta panduan mempelajarinya semuanya dikembangkan dalam bentuk paket bahan ajar yang telah dikembangkan khusus untuk kepentingan pembelajaran jarak jauh.

Media yang paling banyak digunakan sebagai bahan ajar jarak jauh adalah media cetak. Media cetak ini sampai sekarang masih memegang peranan penting dalam menyampaikan materi pelajaran kepada mahasiswa, baik di Amerika Utara maupun di belahan dunia mana pun, walaupun kemajuan teknologi canggih sangat menarik dan berkekuatan tinggi (Misanchuk, 1994). Hal ini menurut Willis (dalam Shery, 1996) dikarenakan media cetak memiliki beberapa kelebihan, seperti :

- dikenal oleh siapa pun, mudah dimengerti oleh mahasiswa, serta diterima oleh mahasiswa,
- selengkapnya dikembangkan dengan mempertimbangkan kecepatan belajar mahasiswa,
- mudah dimanfaatkan, tanpa harus ada alat tertentu,
- teknologi pengembangannya diketahui dengan baik oleh ahli materi dan pengembang instruksional,
- biaya pengembangannya relatif lebih ekonomis dibanding media lain,
- mudah didistribusikan dan direvisi.

Walaupun demikian, media cetak pun tak lepas dari kekurangan. Kekurangan tersebut antara lain adalah sulit untuk menciptakan interaksi, gerakan tidak dapat digambarkan, sangat mahal apabila dikembangkan multi-warna, dan sebagian mahasiswa tidak menguasai teknik membaca media cetak secara optimal.

Media selain cetak yang dapat juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dalam PTJJ adalah media non cetak, seperti audio, video, komputer, dan internet. Walaupun pemanfaatan teknologi canggih ini memegang peranan penting dalam mendesiminasikan materi pelajaran, namun kesuksesan program PTJJ tetap harus difokuskan pada kebutuhan mahasiswa, daripada pada kecanggihan teknologi penyampaian materi pelajarannya (Sherry, 1996). Di samping jenis media, faktor

mahasiswa pun sangat penting untuk dipertimbangkan, karena merekalah aktor utama dalam proses pembelajaran jarak jauh. Hal-hal yang berkaitan dengan mahasiswa antara lain usia, latar belakang ekonomi dan budaya, minat dan pengalaman belajar, tingkatan pendidikan yang pernah dialami, serta tingkat pengetahuan mahasiswa tentang metode dan strategi pembelajaran jarak jauh (Schamber, 1988 dalam Sherry, 1996). Faktor yang sangat penting lainnya untuk suksesnya pembelajaran jarak jauh adalah kepedulian yang berkaitan dengan kepercayaan diri dosen. Dosen dituntut untuk berpengalaman terampil menggunakan sarana dan peralatan pembelajaran, mampu memanfaatkan media pembelajaran dengan kreatif, serta mampu menjaga interaksi tingkat tinggi dengan mahasiswa.

Pengembangan rancangan matakuliah pada sistem PTJJ secara umum sama dengan pendidikan tatap muka, hanya pada sistem PTJJ semuanya dilakukan sebelum proses pembelajaran dilakukan (*pre-planned, pre-recorded, and pre-packaged*), dalam bentuk bahan ajar yang khusus dikembangkan untuk PTJJ (*pecially prepared learning materials*) (Rowntree, 1990). Proses pengembangan kegiatan instruksional pada PTJJ pada umumnya dilakukan melalui tahapan *design, development, evaluation, dan revision* (Willis, 1992 dalam Sherry, 1996). Dalam merancang pembelajaran jarak jauh yang efektif, perlu dipertimbangkan tidak saja tujuan, kebutuhan, dan karakteristik mahasiswa dan dosen, tetapi juga persyaratan isi matakuliah serta kendala-kendala teknis. Apabila diperlukan sistem penyelenggaraan yang tidak biasa/lazim, maka hal tersebut harus dapat diakses oleh siapa pun yang terlibat dalam PTJJ.

Sebagian besar kegiatan belajar mahasiswa dalam sistem PTJJ dilakukan secara mandiri, baik secara individual maupun berkelompok. Belajar mandiri adalah belajar yang dilakukan mahasiswa atas inisiatif mahasiswa sendiri, tanpa perlu diarahkan oleh orang lain. Pelaksanaan belajar mandiri dalam PTJJ difasilitasi oleh bahan ajar yang bersifat dapat membelajarkan sendiri mahasiswa (*self-instruction*), materi pelajarannya utuh dan lengkap (*self contained*) serta bahan ajar yang bersifat berdiri sendiri (*stand alone*), yang memungkinkan mahasiswa dapat belajar secara utuh, lengkap, dan komprehensif dari bahan ajar yang ada, tanpa khawatir kekurangan informasi untuk materi pelajaran tertentu. Bahan ajar untuk keperluan belajar mandiri dirancang dan

dikembangkan secara khusus oleh ahli materi, ahli media dan ahli instruksional, yang menguasai karakteristik bahan ajar jauh.

Berdasarkan karakteristik bahan ajar jarak jauh, karakteristik mahasiswa serta pendekatan belajar mandiri yang diterapkan sistem PTJJ, maka strategi dan metode pembelajarannya pun harus dirancang dan diarahkan kepada hal-hal tersebut. Oleh sebab itu dosen dalam sistem PTJJ harus familiar dengan kegiatan perancangan instruksional dan proses pembelajaran jarak jauh (Sherry, 1996). Supaya dosen PTJJ terampil maka mereka perlu pelatihan yang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh, seperti pelatihan tentang desain pesan dalam pembelajaran (*instruction message design*), strategi pembelajaran menggunakan kamera (*strategies for delivering instruction on-camera*), metode meragamkan tipe presentasi (*methods of diversifying types of presentation*), dll.

Dalam melakukan belajar mandiri bukan berarti sepenuhnya mahasiswa dilepas sepenuhnya untuk belajar sendiri atau berkelompok, tanpa fasilitasi institusi PTJJ. Untuk membantu proses pembelajaran mahasiswa, institusi PTJJ menyediakan fasilitas layanan bantuan belajar yang merupakan bagian integral dari sistem PTJJ. Secara luas, layanan bantuan belajar dalam sistem PTJJ dapat diartikan semua layanan bantuan yang dapat diberikan kepada mahasiswa untuk membantu mereka agar mereka dapat belajar secara mandiri dan sukses (Belawati, 1998 dalam Puspitasari, 2002). Layanan ini merupakan mekanisme umpan balik yang esensial, karena melalui layanan inilah terjadi komunikasi dua arah antara mahasiswa dengan institusi PTJJ (Keegan, 1996 dalam Puspitasari, 2002). Tait (2000, dalam Puspitasari, 2002) mengatakan bahwa layanan bantuan belajar mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi kognitif, afektif, dan fungsi sistemik.

Mahasiswa yang belajar dalam sistem PTJJ melakukan proses pembelajaran tidak hanya lewat bahan ajar saja, tetapi juga melakukan praktek, praktikum, dan pementapan pengalaman lapangan yang dilakukan secara langsung, layaknya pendidikan tinggi tatap muka. Untuk mata kuliah tertentu yang mensyaratkan pencapaian kemampuan kompetensi yang berkaitan dengan ranah psikomotor (keterampilan) dan afektif (sikap) maka mata kuliah dilengkapi dengan praktek, misalnya mata kuliah olahraga dan kesenian untuk mendidik para calon guru; dengan praktikum, misalnya mata kuliah reproduksi ternak, untuk para penyuluh peternakan; dan dilengkapi dengan kegiatan pementapan pengalaman lapangan untuk mata kuliah-mata kuliah penyetaraan guru SD.

Banyak bentuk layanan bantuan belajar yang dapat dimanfaatkan mahasiswa, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Layanan bantuan langsung misalnya yang terjadi di Denver, USA, dimana tutor-tutor dari sanggar atau studio dapat datang mengunjungi mahasiswa di tempat mahasiswa berada, atau sebaliknya mahasiswa yang datang ke sanggar atau studio, untuk berkonsultasi dengan tutor. Di Denver hal ini dapat dilakukan dengan baik, karena jumlah sanggar atau studio hanya beberapa dan tempat tinggal mahasiswa tidak begitu tersebar (Sherry, 1996).

Interaksi dan dukungan belajar pun dapat dilakukan secara tidak langsung, dalam arti respon tidak langsung diterima mahasiswa pada saat mereka mengirim pertanyaan atau masalah. Respon dari tutor baru diterima mahasiswa setelah tertunda beberapa lama. Interaksi tidak langsung ini dapat dilakukan mahasiswa dengan cara mengirimkan *e-mail* atau *fax* yang berisi pertanyaan yang relevan dengan matakuliah yang sedang diambilnya kepada tutor atau teman mahasiswa lainnya. Selanjutnya, tutor atau teman sesama mahasiswa dapat memberikan respon bilamana bisa dan sempat. Interaksi yang sering dilakukan antara mahasiswa dan tutor memungkinkan tutor untuk dapat mengenal mahasiswa dengan lebih baik dibandingkan jika kontak antara mahasiswa dan tutor dilakukan hanya dengan cara menonton tutor di televisi, yang merupakan perkuliahan kelas jauh. Selain layanan bantuan belajar yang berkaitan dengan masalah akademik, mahasiswa juga membutuhkan dukungan pada saat mereka meramu informasi yang diterima, bagaimana mendapatkan tutor, bagaimana dan kapan menyelesaikan dan menyerahkan tugas, serta bagaimana menilai kemajuan belajarnya (Porter, 1994 dalam Sherry, 1996).

Meskipun terdapat perbedaan antar institusi PTJJ dalam menyediakan layanan bantuan belajar bagi mahasiswanya, namun pada umumnya layanan bantuan belajar yang disediakan institusi PTJJ dapat dikategorikan menjadi bantuan akademik dan bantuan non-akademik. Bantuan akademik umumnya diberikan dalam bentuk tutorial, sedangkan bantuan non-akademik dapat dikategorikan kembali menjadi layanan informasi/konsultasi, layanan administrasi akademik dan layanan konseling (Puspitasari, 2002).

Penilaian atau evaluasi terhadap program pendidikan selalu dilakukan dalam sistem pendidikan apa pun. Penilaian atau evaluasi ini dapat dilakukan baik pada awal,

saat program berjalan, maupun pada akhir program. Penilaian pada umumnya dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan program, baik dari segi keterlaksanaannya maupun dari segi keberhasilan mahasiswa yang terlibat dalam program tersebut.

Penilaian atau evaluasi hasil belajar pada sistem PTJJ sama dengan evaluasi hasil belajar pada sistem pendidikan tatap muka, pada prinsipnya kemampuan dan hasil belajar mahasiswa harus dinilai secara tepat dan sesuai. Terdapat beragam strategi evaluasi hasil belajar yang dapat dimanfaatkan. Pilihan terhadap strategi mana yang sesuai, sangat tergantung pada tujuan pembelajaran yang hendak diukur. Contohnya, apabila hasil belajar yang akan diukur lebih bersifat kerjasama antar individu mahasiswa dalam memecahkan suatu permasalahan yang kompleks, maka cara evaluasi tradisional, yang hanya mengandalkan kertas dan pensil, tidaklah cukup. Hal ini harus diganti dengan tugas-tugas yang menantang aktivitas kognitif lebih tinggi serta prosedur evaluasi hasil belajar yang lebih komprehensif, karena hal-hal yang akan dinilai tidak sekedar pengetahuan dan pemahaman, tetapi lebih kepada proses belajar mahasiswa, persepsi serta kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Disamping itu, evaluasi hasil belajar jangan semata-mata dipandang sebagai bagian akhir dari suatu proses pembelajaran. Tetapi harus dipandang sebagai bagian integral dari proses pembelajaran, yang dapat dilakukan sejak awal, selama proses, sampai dengan akhir proses pembelajaran.

Pada akhirnya, untuk memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa, maka dalam sistem PTJJ disediakan juga unit sumber belajar. Unit Sumber Belajar (USB) ini bentuknya beragam tergantung pada fungsinya. Universitas Terbuka memiliki sejenis USB yang tersebar di seluruh pelosok tanah air yang disebut sanggar. Di sanggar inilah para mahasiswa dapat melakukan praktek, misalnya menari, menyanyi, dan lain sebagainya. Di samping sebagai tempat praktek mahasiswa, sanggar pun dapat dijadikan tempat untuk ujian praktek.

BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

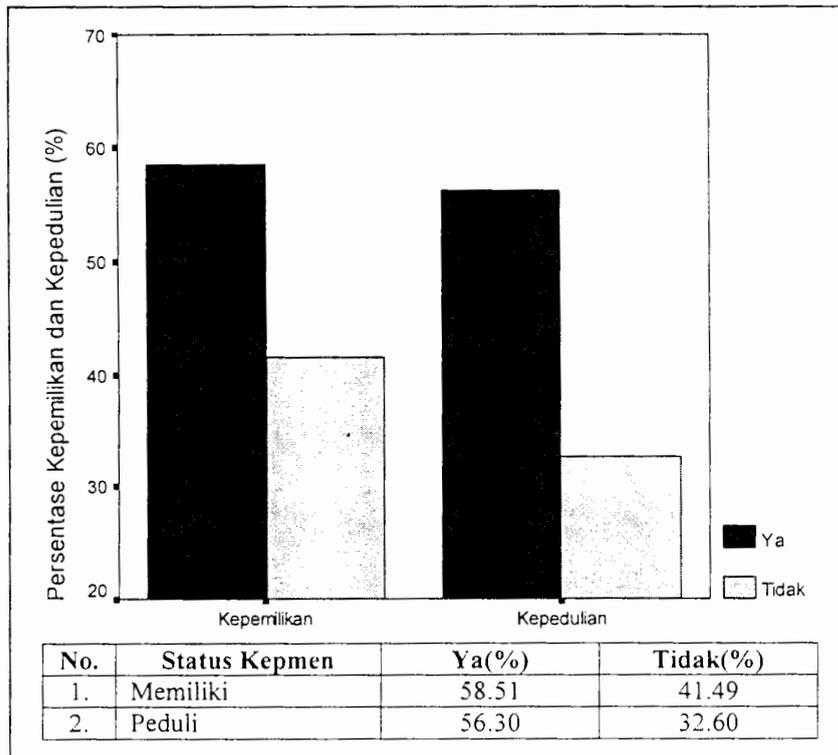
Potret tentang Pemahaman

Sesuai dengan tujuan penelitian yang dijelaskan di muka, definisi operasional dari dimensi pemahaman dalam studi ini adalah jawaban atas pertanyaan “ apakah seluruh pengambil kebijakan di perguruan tinggi, dari mulai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, sampai dengan Dosen, secara individual mengetahui keberadaan dan memahami makna dari Surat Keputusan Mendiknas No. 107/U/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTJJ? ” Secara komprehensif jawaban responden tentang hal tersebut disajikan dalam Gambar 2. Secara khusus, jawaban responden adalah sebagai berikut.

A. Keberadaan dan Kepemilikan Kepmen No.107/U/2001

Data tentang keberadaan, kepemilikan, dan kepedulian responden terhadap Kepmen No. 107/U/2001 serta isinya terlihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Keberadaan, Kepemilikan Dan Kepedulian Responden Terhadap Kepmen



Dari 135 orang responden yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan kepemilikan dokumen Kepmen, data menunjukkan bahwa 79 orang diantaranya (atau setara dengan 58.51%) mengatakan memiliki dokumen Kepmen dan 56 orang (41.49%) mengaku tidak memiliki dokumen. Mencermati keadaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa konsep tentang pendidikan jarak jauh dengan segala macam karakteristiknya baru dipahami oleh sebagian dari keseluruhan jajaran *civitas academica* di perguruan tinggi. Kekurangpahaman inilah barangkali yang menyebabkan banyak perguruan tinggi yang menyelenggarakan kelas jauh menganggapnya sebagai PTJJ.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, dari 79 orang responden yang mengatakan memiliki dokumen, sebagian besar, yaitu 52 orang (65,82%) mengatakan memperoleh dokumen Kepmen tersebut dari pejabat dari perguruan tingginya sendiri, seperti dari Rektor, PR I, Dekan, PD I, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi. Dua puluh tujuh orang sisanya (setara dengan 34,18%) mengatakan memperoleh dokumen Kepmen tersebut dari pihak lain, seperti kolega, dirjen dikti, orang lain, Mendiknas, pejabat perguruan tinggi lain, serta dari Kopertis. Data ini menunjukkan bahwa telah ada kesadaran dan komitmen yang tinggi dikalangan pengambil kebijakan di perguruan tinggi untuk mensosialisasikan Kepmen kepada kalangan di bawahnya, walaupun belum seratus persen tercapai. Harapannya, dengan semakin terbarnya Kepmen ini dikalangan pengambil kebijakan di perguruan tinggi, maka semakin tinggi juga tingkat pemahaman para pengambil kebijakan di perguruan tinggi tentang PTJJ. Sehingga praktek-praktek kelas jauh dapat diminimalisir atau bahkan dihentikan sama sekali.

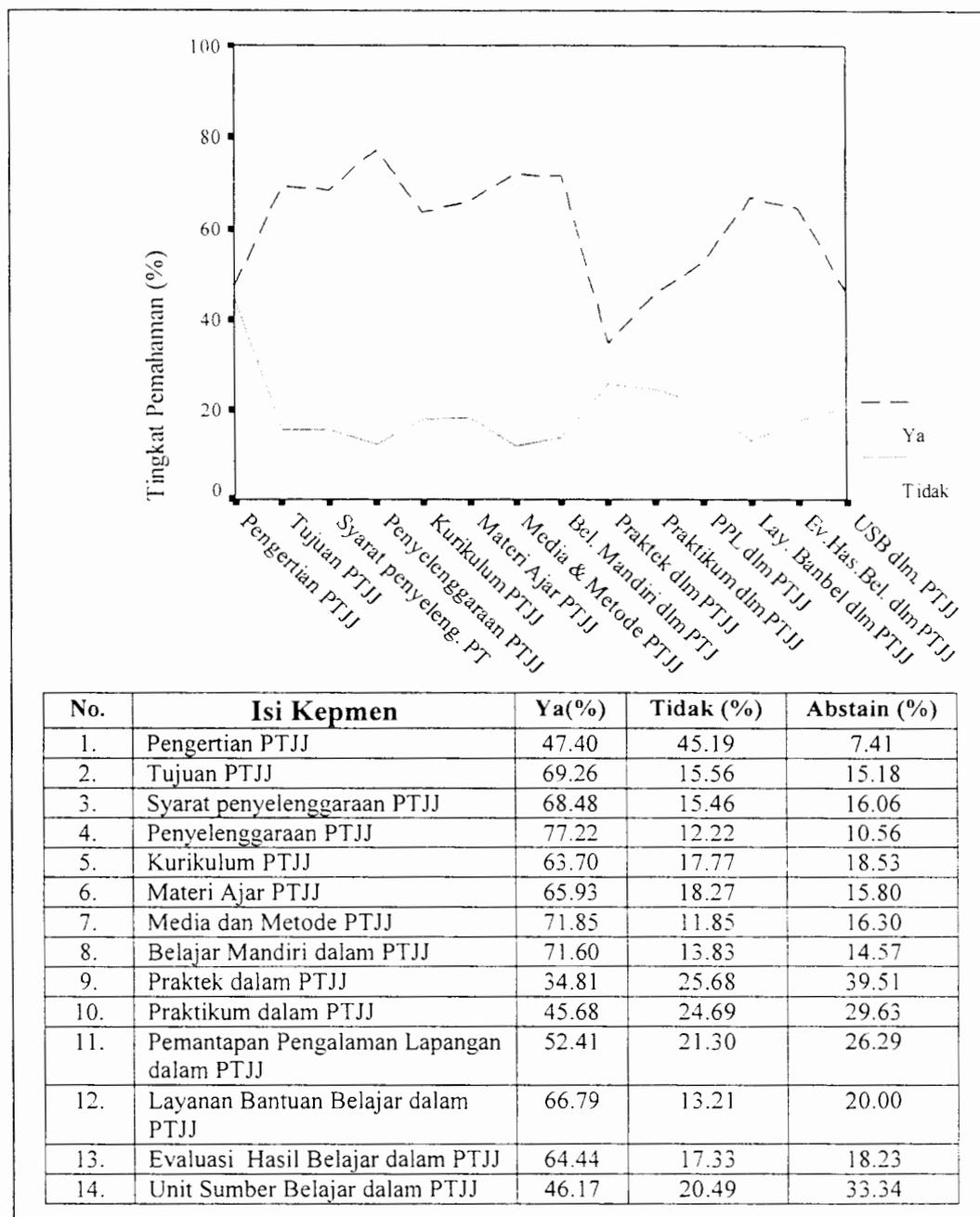
Pada saat ditanya tentang kepedulian terhadap Kepmen No.107/U/2001, sebagian besar (56,3%) dari responden yang mengaku memiliki dokumen Kepmen mengatakan bahwa mereka peduli terhadap isi Kepmen tersebut, sisanya sebanyak 32,6% mengatakan tidak peduli, dan 11,1 % tidak berpendapat. Melihat kenyataan ini, terlihat lebih kecil persentase para pengambil kebijakan di perguruan tinggi yang peduli terhadap isi Kepmen, dibanding yang tidak peduli sama sekali. Kalau dibandingkan dengan total responden yang 135 orang, maka hanya 45 orang (33.33%) diantaranya yang memiliki dokumen Kepmen dan peduli terhadap isinya.

Hal ini sangat menyedihkan. Di satu sisi, banyak perguruan tinggi yang menginginkan membuka PTJJ, tetapi di sisi lain pada saat aturan mainnya dibuat, hanya sebagian kecil saja yang peduli. Akibatnya, pada saat mereka menyelenggarakan PTJJ, mereka tidak peduli dengan syarat-syaratnya. Jadi, yang dilakukan adalah praktek kelas jauh, yang sangat bertentangan dengan prinsip PTJJ.

B. Pemahaman tentang isi Kepmen Mendiknas No.107/U/2001

Pemahaman responden terhadap isi Kepmen ditunjukkan dengan jawaban responden terhadap item-item pertanyaan yang berkaitan dengan pengertian, tujuan, syarat penyelenggaraan, penyelenggaraan, kurikulum, materi ajar, media dan metode, belajar mandiri, praktek dan praktikum, pemantapan pengalaman lapangan, layanan bantuan belajar, evaluasi hasil belajar, serta unit sumber belajar dalam PTJJ. Jawaban memahami diwakili oleh jawaban sangat setuju dan setuju terhadap Kepmen menurut skala Likert, sementara kondisi tidak memahami ditunjukkan dengan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju dari responden (rentangan 1 sampai dengan 4, dengan 1=sangat tidak setuju; 2=tidak setuju; 3=setuju; dan 4=sangat setuju). Kalau dilihat secara umum, isi Kepmen dipahami oleh sebagian besar responden (rerata 60,41%). Sisanya, 19,46% tidak memahami dan yang tidak berpendapat berjumlah 20,13%.

Gambar 2. Tingkat Pemahaman Responden terhadap Isi Kepmen



Secara rinci pemahaman responden terhadap masing-masing item dalam Kepmen adalah sebagai berikut.

1. Pemahaman tentang Pengertian PTJJ

Pengertian tentang PTJJ hanya dipahami oleh 64 orang responden (setara dengan 47.40%). Hal ini tidak berbeda jauh dengan responden yang tidak

memahami, yaitu sekitar 61 orang responden (setara dengan 45.19%), ditambah lagi dengan responden yang tidak berpendapat yaitu 10 orang (setara dengan 7.41%). Jadi kalau ditotal, responden yang tidak memahami pengertian PTJJ lebih besar, yaitu 71 orang (52.60%) dibanding responden yang memahami, yaitu 64 orang (47.40%). Kekurangpahaman terhadap pengertian PTJJ ini diduga yang menyebabkan maraknya praktek kelas jauh akhir-akhir ini.

2. Pemahaman tentang Tujuan PTJJ

Yang menarik dalam studi ini adalah walaupun pengertian PTJJ dipahami hanya oleh sebagian kecil responden, tetapi pada saat ditanyakan tentang tujuan PTJJ 94 orang responden (69.26%) mengatakan memahami tujuan PTJJ tersebut, dan hanya 21 orang responden (15.56 %) yang tidak memahami serta 20 orang responden (15.18%) yang tidak berpendapat. Jadi agak aneh memang, pemahaman tentang pengertian PTJJ tidak berbanding lurus dengan pemahaman terhadap tujuan PTJJ. Idealnya terdapat korelasi yang positif antara pemahaman terhadap pengertian PTJJ dengan pemahaman terhadap tujuan PTJJ.

3. Pemahaman tentang Syarat Penyelenggaraan PTJJ

Pemahaman responden terhadap syarat penyelenggaraan PTJJ sebanding dengan pemahamannya terhadap tujuan PTJJ. Data menunjukkan bahwa syarat penyelenggaraan PTJJ dipahami oleh 92 orang responden (68.48%). Sementara responden yang tidak memahami berjumlah 21 orang (15.06%) dan yang tidak berpendapat 22 orang (16.46%). Jadi sebenarnya, walaupun pengertian PTJJ hanya dipahami oleh 64 orang responden, tetapi makna tujuan dan syarat penyelenggaraan PTJJ dipahami oleh 90 an orang responden. maka praktek-praktek kelas jauh semestinya tidak perlu terjadi. Tetapi dalam kenyataannya, walaupun aturan mainnya sudah ada, tetap saja masih ada perguruan tinggi yang tidak mengindahkan aturan tersebut, seolah-olah aturan main tersebut tidak ada. Yang disayangkan dari praktek kelas jauh ini justru dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi negeri yang cukup ternama.

4. Pemahaman tentang Penyelenggaraan PTJJ

104 orang responden (77.22%) memahami pengertian tentang penyelenggaraan PTJJ dalam studi ini. Sementara 17 orang responden (12.22%) tidak memahami, dan sisanya 14 orang responden (10.56%) tidak berpendapat. Dengan tingkat pemahaman yang tinggi dari responden terhadap penyelenggaraan PTJJ seharusnya praktek kelas jauh dapat dihindari, tetapi kenyataan yang terjadi sebaliknya. Penyelenggaraan kelas jauh dari hari ke hari semakin menjamur. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap makna PTJJ ataukah walaupun mereka mengerti makna PTJJ tetapi tetap saja tidak peduli terhadapnya. Melihat fenomena ini, sekilas terlihat adanya ketidakpedulian perguruan tinggi terhadap instruksi dari atasannya, dalam hal ini Dirjen Dikti dan Mendiknas. Kalau situasi ini benar adanya, maka dapat dibayangkan carut marutnya pengelolaan pendidikan, khususnya PTJJ, di tanah air tercinta ini.

5. Pemahaman tentang Kurikulum PTJJ

Banyak kalangan beranggapan bahwa kurikulum PTJJ berlainan dengan kurikulum pendidikan tatap muka. Hal tersebut tidak benar, karena walaupun strategi pembelajaran dalam PTJJ berlainan dengan pendidikan tatap muka, tetapi kurikulum yang diacunya adalah sama. Hal ini sejalan dengan oleh hasil studi yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu sekitar 86 orang (63.70%) memahami arti kurikulum dalam PTJJ. Hanya sekitar 24 orang responden (17.77%) yang tidak memahami, dan 25 orang responden (18.52%) yang tidak berpendapat. Pemahaman tentang kurikulum ini pada kenyataannya dipakai oleh para penyelenggara kelas jauh untuk menawarkan program pendidikan yang biasanya diberikan secara tatap muka. Tetapi dalam prakteknya, kurikulum tersebut disampaikan oleh dosen aslinya, tanpa dikemas dalam bentuk bahan ajar yang dapat dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa. Dalam penyampaian materinya, jadwalnya dipadatkan dan perkuliahan dilakukan di luar kampus aslinya. Kondisi seperti yang dipandang oleh mereka sebagai PTJJ, walau sebenarnya kelas jauh.

6. Pemahaman tentang Materi Ajar PTJJ

Materi Ajar adalah bahan belajar utama dalam PTJJ. Materi Ajar ini idealnya dikembangkan dengan pendekatan *self-instruction*, *self-contained*, dan *stand alone*. Karakteristik tersebut harus tercermin dalam materi ajar yang dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk belajar mandiri. 89 orang responden (65.93%) mengakui memahami pengertian tentang materi ajar dalam Kepmen yang sangat khas PTJJ ini. 25 orang (18.27%) tidak memahami dan 21 orang (15.80%) tidak berpendapat. Jadi, walaupun pemahaman terhadap materi ajar dalam PTJJ cukup tinggi, tetapi lagi-lagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan kelas jauh tidak memperdulikan aturan main yang ada. Mereka tidak merancang bahan ajar untuk kepentingan belajar mandiri, tetapi menggunakan bahan ajar untuk kepentingan pendidikan tatap muka dalam perkuliahan tatap muka yang perkuliahannya dilakukan di luar kampus utamanya.

7. Pemahaman tentang Media dan Metode dalam PTJJ

Media dan metode dalam PTJJ agak sedikit berbeda dengan media dan metode dalam pendidikan tatap muka. Hal ini dikarenakan media dan metode dalam PTJJ merupakan alat pengganti dosen, yang berlainan dengan pendidikan tatap muka dimana media dan metode yang digunakan dosen dalam melakukan proses pembelajaran berindak sebagai alat bantu. Dari hasil penelitian tentang pemahaman responden terhadap pengertian media dan metode dalam PTJJ, data menunjukkan bahwa 97 orang responden (71.85%) memahami pengertian media dan metode dalam PTJJ, 16 orang responden (11.85%) tidak memahami, dan 22 orang responden (16.30%) tidak berpendapat. Jadi, dengan hasil ini semestinya para penyelenggara pendidikan tinggi memahami betul kriteria penyelenggaraan PTJJ, bukan seperti kelas jauh yang selama ini dilaksanakan. Dalam PTJJ, peran media sangat dominan, karena lewat perantaraan media lah mahasiswa dimungkinkan untuk belajar secara mandiri.

8. Pemahaman tentang Belajar Mandiri dalam PTJJ

Belajar mandiri merupakan salah satu karakteristik utama dalam PTJJ. Tanpa kemampuan belajar mandiri, akan sulit bagi seseorang untuk dapat mengikuti PTJJ. Bagi 97 orang responden (71.60%) konsep belajar mandiri dalam PTJJ ini dipahami sebagai sesuatu yang perlu dimiliki oleh seseorang yang mau mengikuti PTJJ. Tetapi 17 orang responden (13.83%) tidak memahami konsep belajar mandiri tersebut dan 21 orang responden (14.57%) tidak berpendapat. Pemahaman responden yang cukup tinggi terhadap konsep belajar mandiri ini semestinya menjadi landasan berfikir para penyelenggara PTJJ dalam mengelola pendidikannya. Seharusnya konsep kelas jauh, sudah tidak dipakai lagi karena secara konseptual berbeda dengan PTJJ.

9. Pemahaman tentang Praktek dan Praktikum

Pelaksanaan praktek dan praktikum dalam PTJJ tidak berbeda dengan dalam pendidikan tatap muka. Kompetensi yang diukur dalam kegiatan praktek dan kurikulum adalah sama, karena kurikulum yang diacunya pun sama. Oleh sebab itu, tidak terdapat perbedaan antara praktek dan praktikum dalam PTJJ dengan pendidikan tatap muka. Perbedaannya hanya terletak dalam penyelenggaraan dan pengelolaannya saja. Namun, walaupun praktek dan praktikum dalam pendidikan jarak jauh dan pendidikan tatap muka sama, para responden belum memahami sepenuhnya persamaan tersebut. Hal ini terbukti dari hasil studi yang menunjukkan hanya kurang dari setengah jumlah responden, yaitu 54 orang (40.25%) yang memahami persamaan tersebut, sementara sisanya 34 orang responden (25.19%) tidak memahami dan 47 orang responden (34.556%) tidak berpendapat. Hal ini terjadi barangkali dikarenakan para responden mempersepsikan PTJJ berbeda sama sekali dengan pendidikan tatap muka. Padahal, dalam beberapa hal ada perbedaan antara PTJJ dengan pendidikan tatap muka, misalnya dalam hal karakteristik penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajarannya, tetapi dalam hal tertentu tidak berbeda, misalnya dalam hal kurikulum, tujuan, praktek dan praktikum, dan sebagainya.

10. Pemahaman tentang Pemantapan Pengalaman Lapangan

Sama seperti halnya praktek dan praktikum, pemantapan pengalaman lapangan dalam PTJJ tidak berbeda dengan dalam pendidikan tatap muka, karena kompetensi yang diukur pun sama dan mengacu pada kurikulum yang sama pula. Dalam hal ini, pemahaman responden tentang makna pemantapan pengalaman lapangan dalam PTJJ tidak jauh berbeda, karena sebagian besar responden, yaitu 71 orang (52.41%) menyatakan memahami konsep pemantapan pengalaman lapangan dalam PTJJ yang sama dengan pendidikan tatap muka, hanya 29 orang (21.30%) yang tidak memahami dan 35 orang (26.29%) yang tidak berpendapat.

11. Pemahaman tentang Layanan Bantuan Belajar

Layanan bantuan belajar dalam pendidikan jarak jauh agak sedikit berlainan dengan layanan bantuan belajar dalam pendidikan tatap muka. Dalam PTJJ, yang dimaksud dengan layanan bantuan belajar meliputi layanan bantuan dalam bidang akademik, administrasi kemahasiswaan, dan bimbingan konseling pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% responden memahami makna layanan bantuan belajar dalam PTJJ. Tepatnya, 71 orang responden (52.41%) mengatakan memahami makna layanan bantuan belajar dalam pendidikan jarak jauh yang tidak berbeda dengan pendidikan tatap muka, 29 orang (21.30%) tidak memahami dan 35 orang (26.29%) tidak berpendapat.

12. Pemahaman tentang Evaluasi Hasil Belajar

Pelaksanaan evaluasi hasil belajar dalam pendidikan jarak jauh sama dengan dalam pendidikan tatap muka. Hal ini sejalan dengan pemahaman responden dalam studi ini. Sebagian besar responden, yaitu sebanyak 87 orang (64.44%) memahami hal tersebut, sisanya 23 orang (17.33%) tidak memahami, dan 25 orang (18.22%) tidak berpendapat.

13. Pemahaman tentang Unit Sumber Belajar

Unit sumber belajar dalam PTJJ merupakan sesuatu yang penting, yang lokasinya harus tersebar dan letaknya berdekatan dengan lokasi mahasiswa

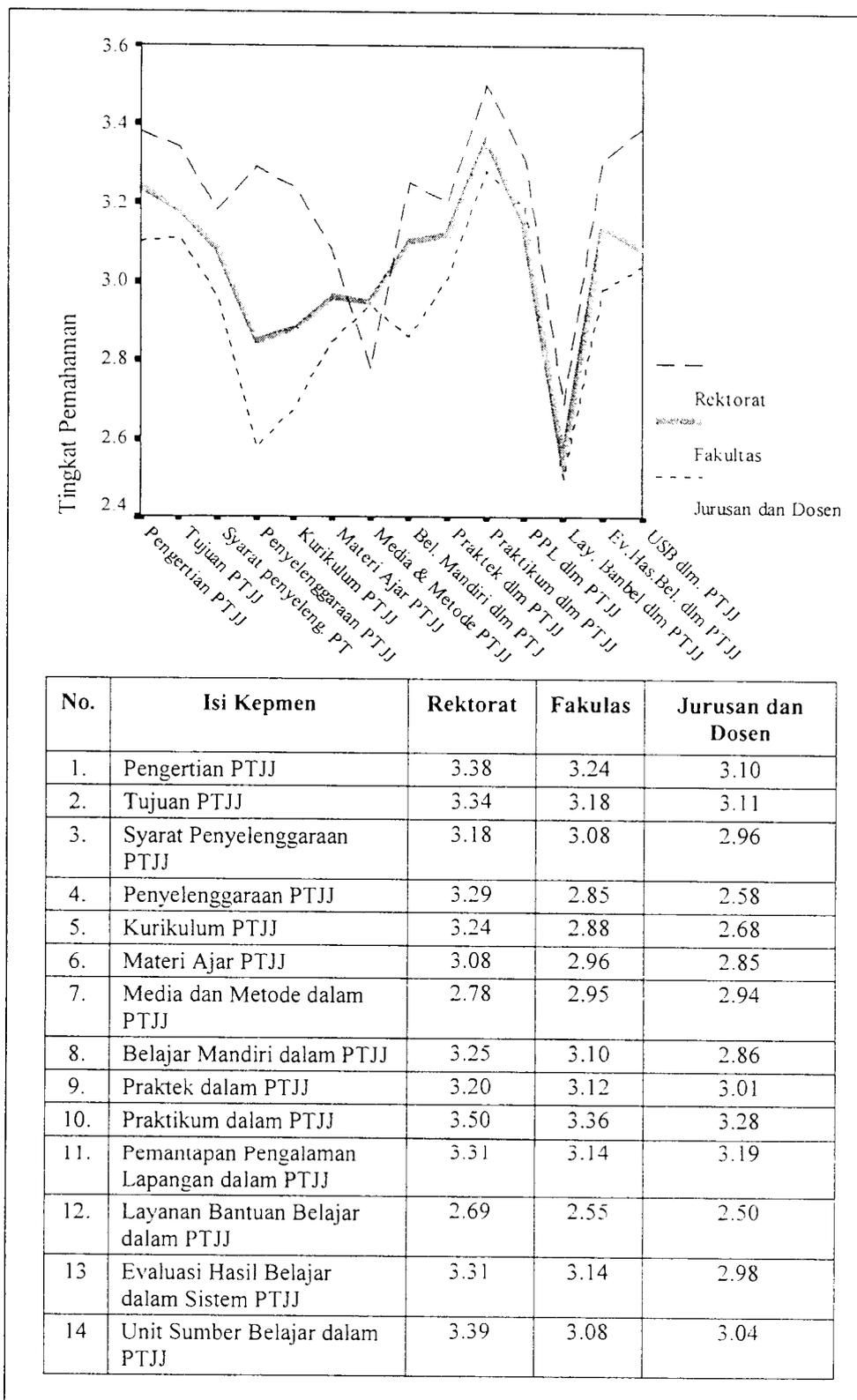
berada. Kondisi semacam ini belum dipahami sepenuhnya oleh seluruh responden. Baru 62 orang responden (46.17%) yang mengakui memahami, sisanya lebih dari 50%, yaitu 28 orang (20.49%) tidak memahami dan 45 orang (33.33%) tidak berpendapat. Keadaan ini menunjukkan bahwa responden belum memahami sepenuhnya karakteristik pengelolaan PTJJ, sehingga dianggapnya sama saja dengan pengelolaan pendidikan tatap muka. Akibatnya, praktek kelas jauh tetap dilaksanakan.

Apabila dirangkum secara singkat, maka dari 14 item karakteristik PTJJ yang terdapat dalam Kepmen No.107/U/2001, terdapat 9 (sembilan) item karakteristik pendidikan jarak jauh yang sudah dipahami oleh lebih dari 50% responden. Karakteristik PTJJ tersebut adalah tujuan, syarat penyelenggaraan PTJJ, penyelenggaraan PTJJ, kurikulum PTJJ, materi ajar PTJJ, media dan metode dalam PTJJ, belajar mandiri, evaluasi hasil belajar dan layanan bantuan belajar. Sementara karakteristik PTJJ yang tidak dipahami oleh lebih dari 50% responden adalah pengertian PTJJ, praktek dan praktikum dalam PTJJ, pemantapan pengalaman lapangan dalam PTJJ serta unit sumber belajar. Apabila fenomena pemahaman ini dikaji lebih dalam, semestinya praktek kelas jauh tidak perlu terjadi, karena berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan jauh dari hasil studi ini sebagian besar dipahami oleh responden. Dalam kenyataannya, aturan main telah ada dan dipahami, tetapi tidak dijadikan acuan dalam penyelenggaraan PTJJ di perguruan tinggi, sehingga tetap saja praktek kelas jauh terjadi di lapangan. Hal ini apakah merupakan pembangkangan para pengelola pendidikan tinggi terhadap keputusan Mendiknas, ataukah hanya sekedar ketidakperdulian saja. Oleh sebab itu, untuk mengetahui lebih lanjut alasan dibalik tidak diperdulikannya Kepmen ini perlu dilakukan studi lebih lanjut.

C. Perbedaan Tingkat Pemahaman Para Pengambilan Kebijakan Di Perguruan Tinggi Dilihat Dari Perbedaan Jabatan Struktural, Golongan, Kategori Fakultas, Lokasi PT, Serta Perbedaan Jenis Kelamin, Terhadap Isi KEPMEN No. 107/U/2001

Setelah dikaji lebih dalam, data hasil studi secara umum menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan dalam pemahaman isi Kepmen No.107/U/2001 antara para pengelola perguruan tinggi dilihat dari perbedaan jabatan struktural, golongan, kategori fakultas, lokasi perguruan tinggi, dan perbedaan jenis kelamin. Walaupun demikian, terdapat penurunan tingkat pemahaman antar tingkatan pengelola perguruan tinggi, yaitu antar rektorat, fakultas, dan jurusan. Demikian pun terdapat penurunan tingkat pemahaman antar golongan IV dan golongan III, antara fakultas eksak dan non eksak, perguruan tinggi di Jawa dan di Luar Jawa, serta antara para pengambil kebijakan di perguruan tinggi yang berjenis kelamin pria dan wanita. Secara rinci data tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut.

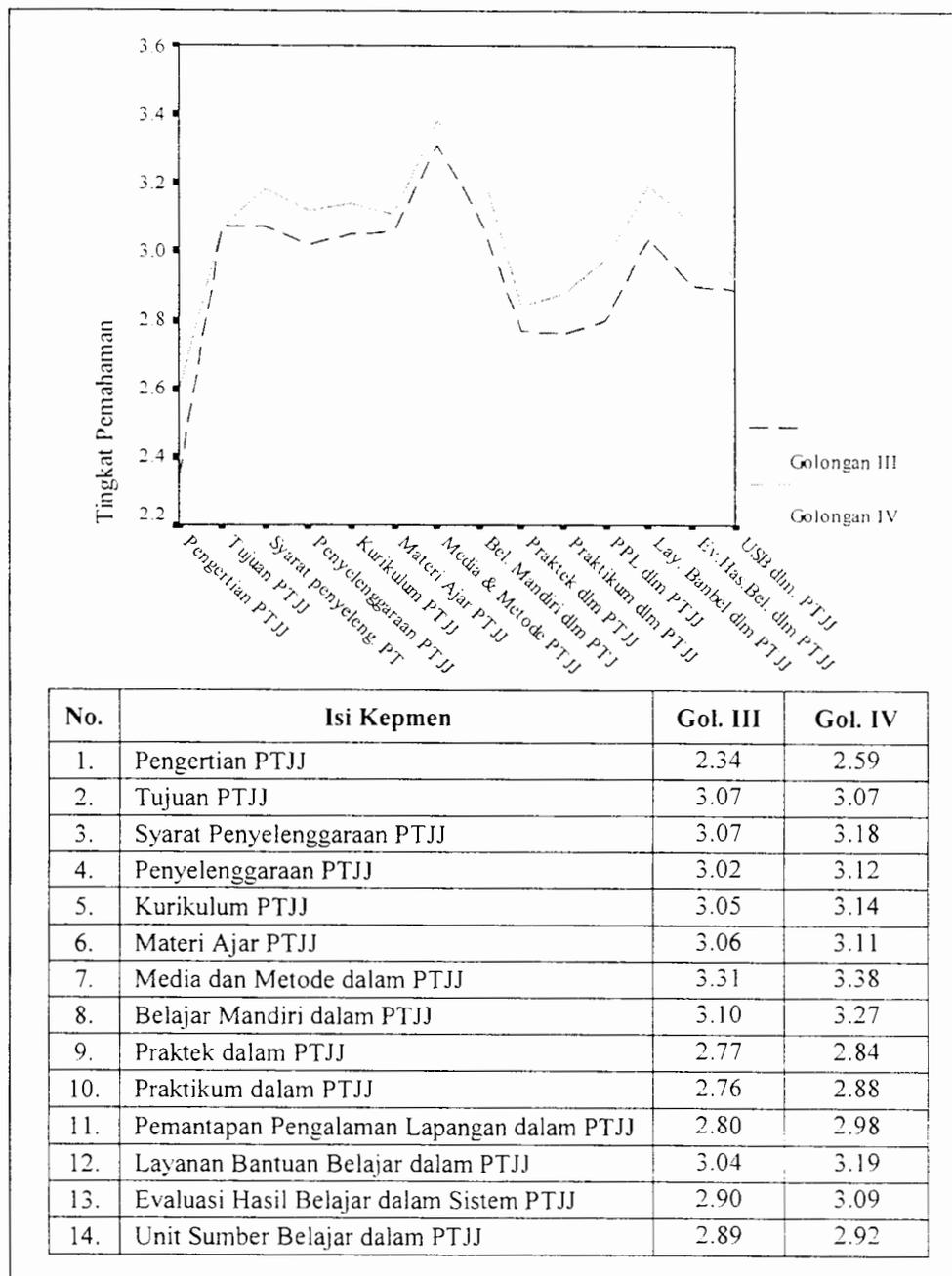
Gambar 3. Kejelasan Kepmen Menurut Kategori Struktural



Pada umumnya, para pengambil kebijakan di perguruan tinggi, dari mulai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program sampai dengan Dosen memiliki pemahaman yang cukup tinggi terhadap isi Kepmen No.107/U/2001. Hal ini terbukti dari data yang ada bahwa tingkat pemahaman mereka rata-rata diatas 3, yaitu setuju dengan pernyataan dalam Kepmen tentang berbagai hal yang berkaitan dengan PTJJ atau dengan kata lain mereka memahami arti setiap pernyataan yang terdapat dalam Kepmen, kecuali pemahaman terhadap media, metode dan layanan bantuan belajar saja yang nilainya dibawah 3, artinya kurang dipahami.

Apabila diamati tren tingkat pemahaman antar tingkat pengelola ini, terlihat adanya kecenderungan penurunan tingkat pemahaman, dimana pengelola perguruan tinggi pada tingkat rektorat lebih tinggi tingkat pemahamannya dibanding pengelola tingkat fakultas dan tingkat jurusan. Hal ini kemungkinan dikarenakan Kepmen pertama kali diterima oleh para pengelola perguruan tinggi tingkat rektorat. Di samping itu, pengelola perguruan tinggi tingkat rektorat diasumsikan lebih mudah akses terhadap informasi yang berkaitan dengan PTJJ dibandingkan pengelola tingkat fakultas dan tingkat jurusan. Namun ada yang agak aneh, yaitu tingkat pemahaman pengelola perguruan tinggi pada tingkat rektorat lebih rendah terhadap media dan metode dalam PTJJ dibanding pengelola tingkat fakultas dan jurusan. Kemungkinan hal ini terjadi karena para pengelola tingkat perguruan tinggi lebih *concern* terhadap masalah kebijakan, sementara pengelola tingkat fakultas dan jurusan adalah mereka yang melaksanakan langsung proses pembelajaran, yang terkait erat dengan pemanfaatan media dan metode pembelajaran. Sehingga mereka lebih memahami pengertian media dan metode, bukan saja dari segi konseptual, tetapi secara teknis operasional juga.

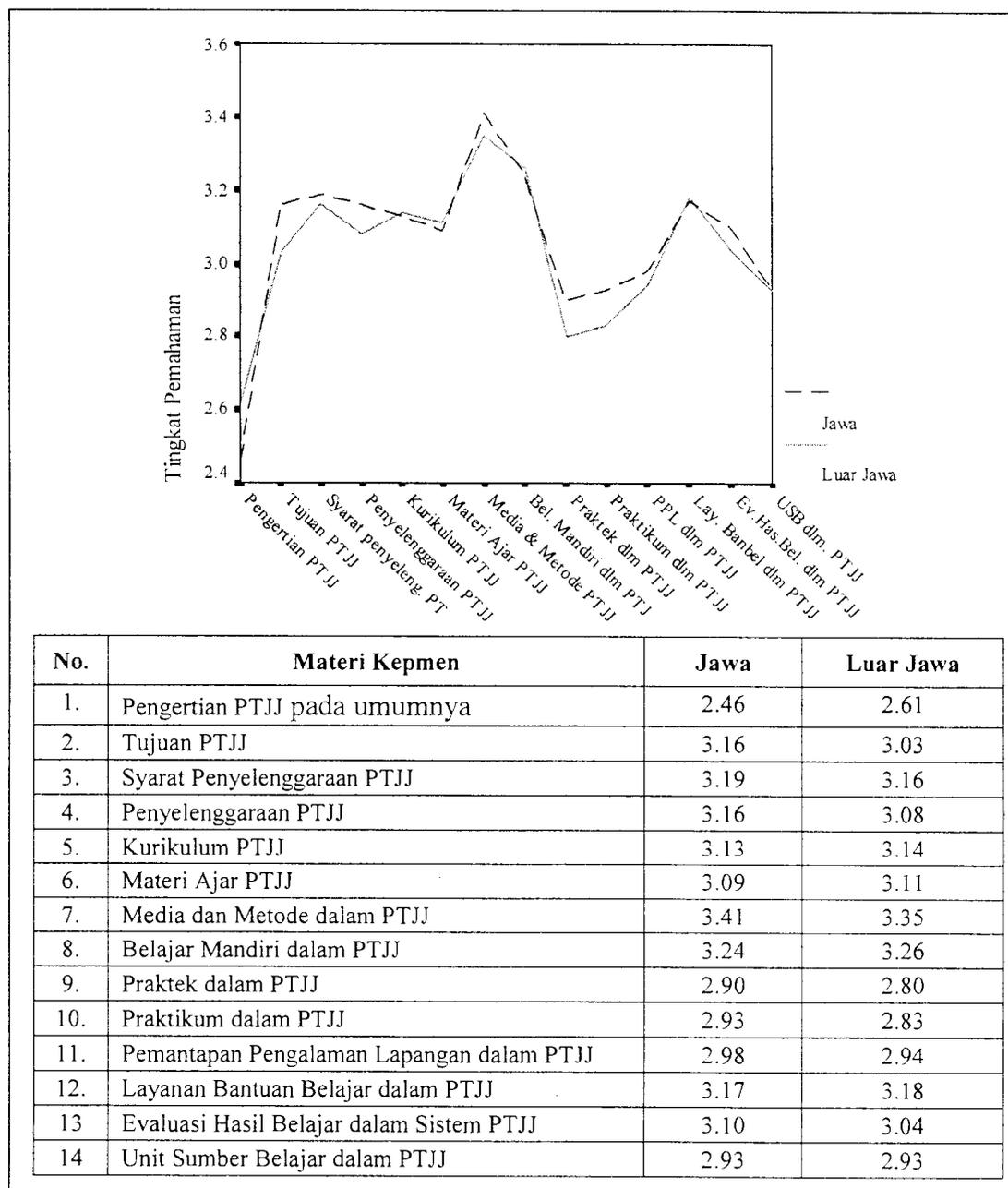
Gambar 4. Kejelasan Kepmen Menurut Kategori Golongan



Secara umum, para pengambil kebijakan di perguruan tinggi yang bergolongan IV memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi terhadap isi Kepmen daripada yang bergolongan III. Hal ini senada dengan pengelola PT tingkat rektorat yang memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi terhadap Kepmen No.107/U/2001, dibanding dengan tingkat pemahaman para pengelola perguruan tinggi di tingkat fakultas dan

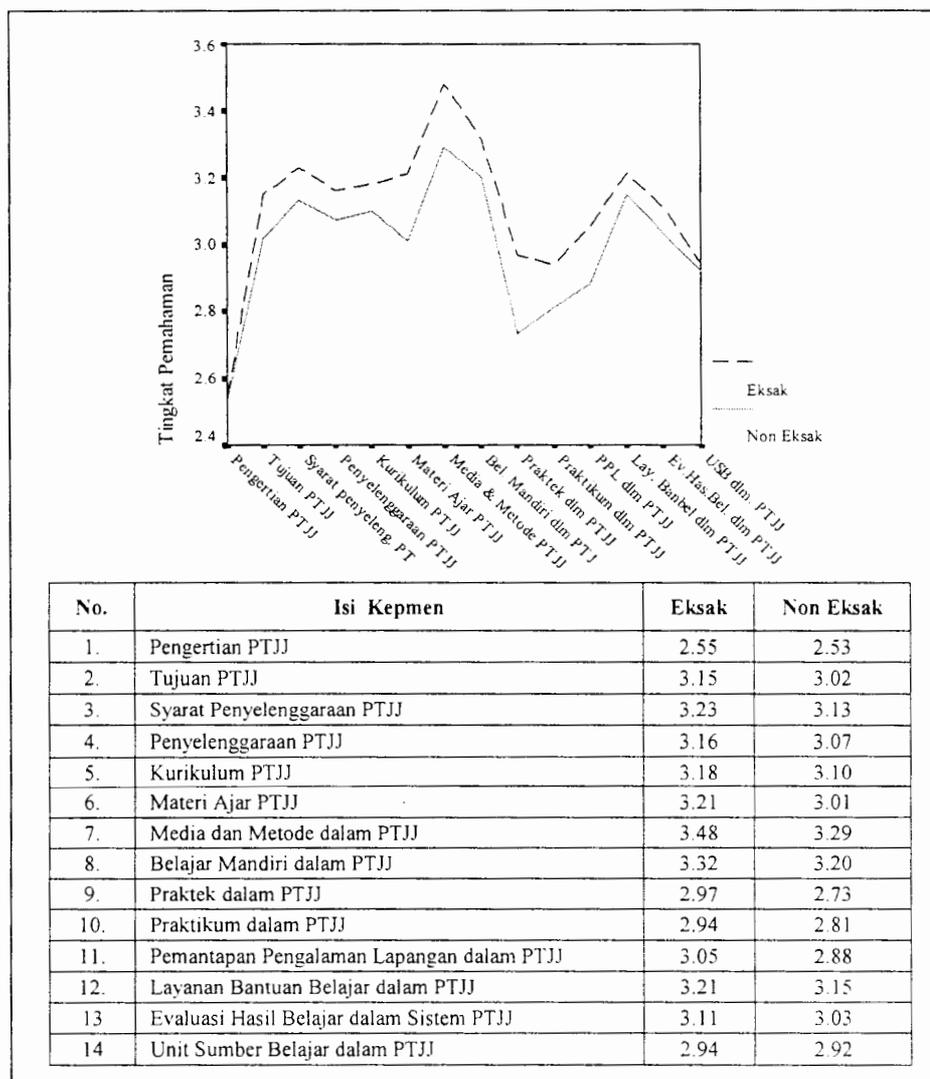
jurusan. Keadaan semacam ini dikarenakan para pengambil kebijakan di PT yang bergolongan IV sudah menduduki posisi jabatan struktural yang lebih lama dibanding yang bergolongan III pada umumnya. Seperti dikemukakan sebelumnya, para pengambil kebijakan yang berkedudukan lebih tinggi memiliki kemudahan akses terhadap informasi yang lebih tinggi pula dibanding yang berkedudukan lebih rendah. Oleh sebab itu, pemahaman mereka terhadap isi Kepmen lebih tinggi dibanding yang bergolongan lebih rendah.

Gambar 5. Kejelasan Kepmen Menurut Kategori Lokasi



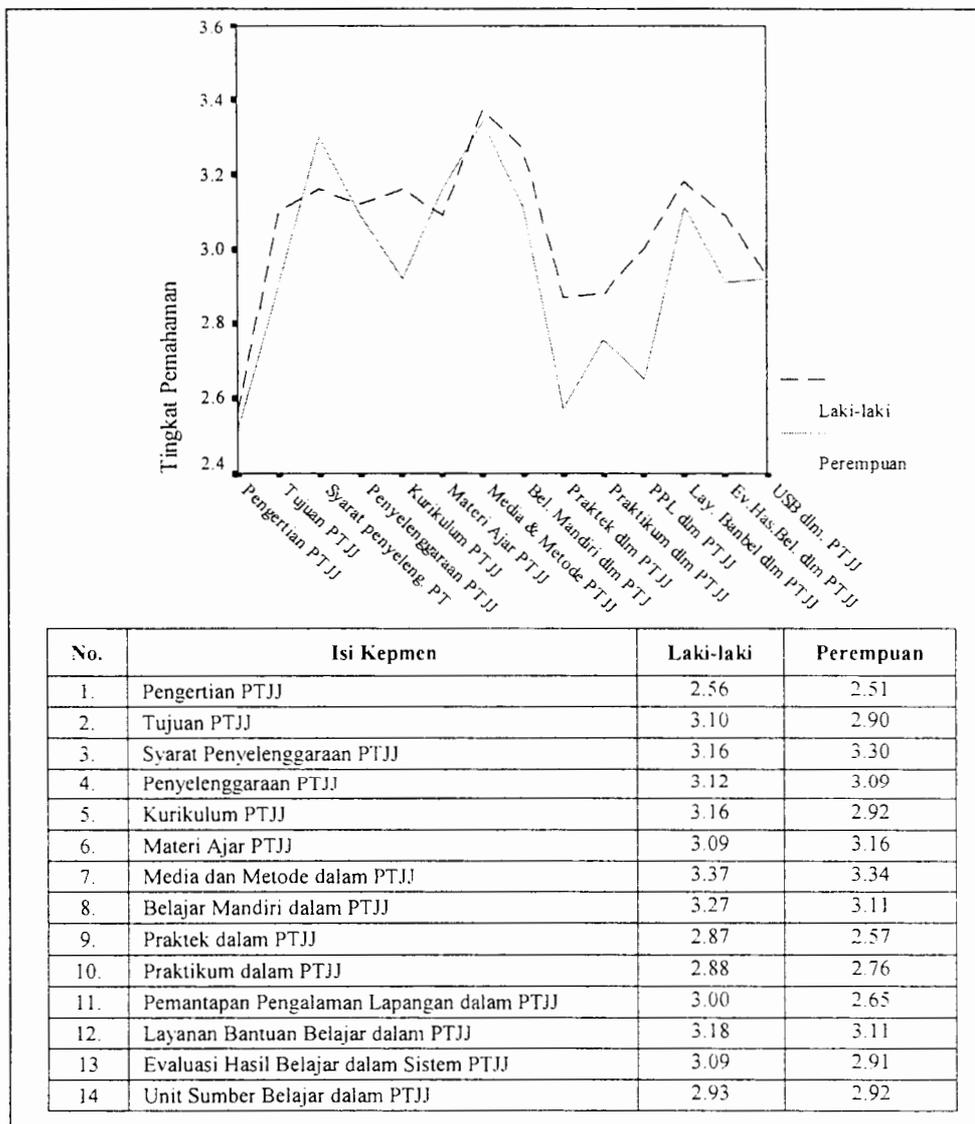
Pada umumnya, para pengambil kebijakan di PT yang berlokasi di Jawa memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi dibanding para pengambil kebijakan di PT yang berlokasi di luar Jawa. Hal ini kemungkinan dikarenakan para pengambil kebijakan di PT yang berlokasi di Jawa lebih mudah mengakses informasi yang berkaitan dengan PTJJ dibanding para pengambilan kebijakan di PT yang berlokasi di luar Jawa. Walaupun terdapat lima pernyataan yang berkaitan dengan pengertian, kurikulum, materi ajar, belajar mandiri dan layanan bantuan belajar dalam PTJJ yang dipahami secara lebih baik oleh para pengambil kebijakan PT di luar Jawa daripada yang di Jawa, tetapi perbedaan tersebut tidak signifikan, karena perbedaannya hanya berkisar 0.01 – 0.02 saja.

Gambar 6. Kejelasan Kepmen Menurut Kategori Fakultas



Secara keseluruhan, para pengambil kebijakan di perguruan tinggi yang berasal dari fakultas eksakta memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi terhadap seluruh pernyataan yang terdapat dalam Kepmen no. 107/U/2001 dibanding yang berasal dari fakultas non-eksakta. Keadaan semacam ini kemungkinan dikarenakan para pengambil kebijakan di perguruan tinggi yang berlatar eksakta dapat berfikir dengan lebih logis, realistis dan *to the point* dibanding mereka yang berlatar belakang non-eksakta. Fenomena semacam ini menarik untuk dicermati, karena masih dipertanyakan apakah betul asumsi yang mengatakan bahwa pengelola pendidikan tinggi yang berlatar belakang eksakta lebih logis, realistis, dan *to the point* dibanding yang non eksakta? Hal ini perlu dikaji lebih jauh.

Gambar 7. Kejelasan Kepmen Menurut Kategori Gender

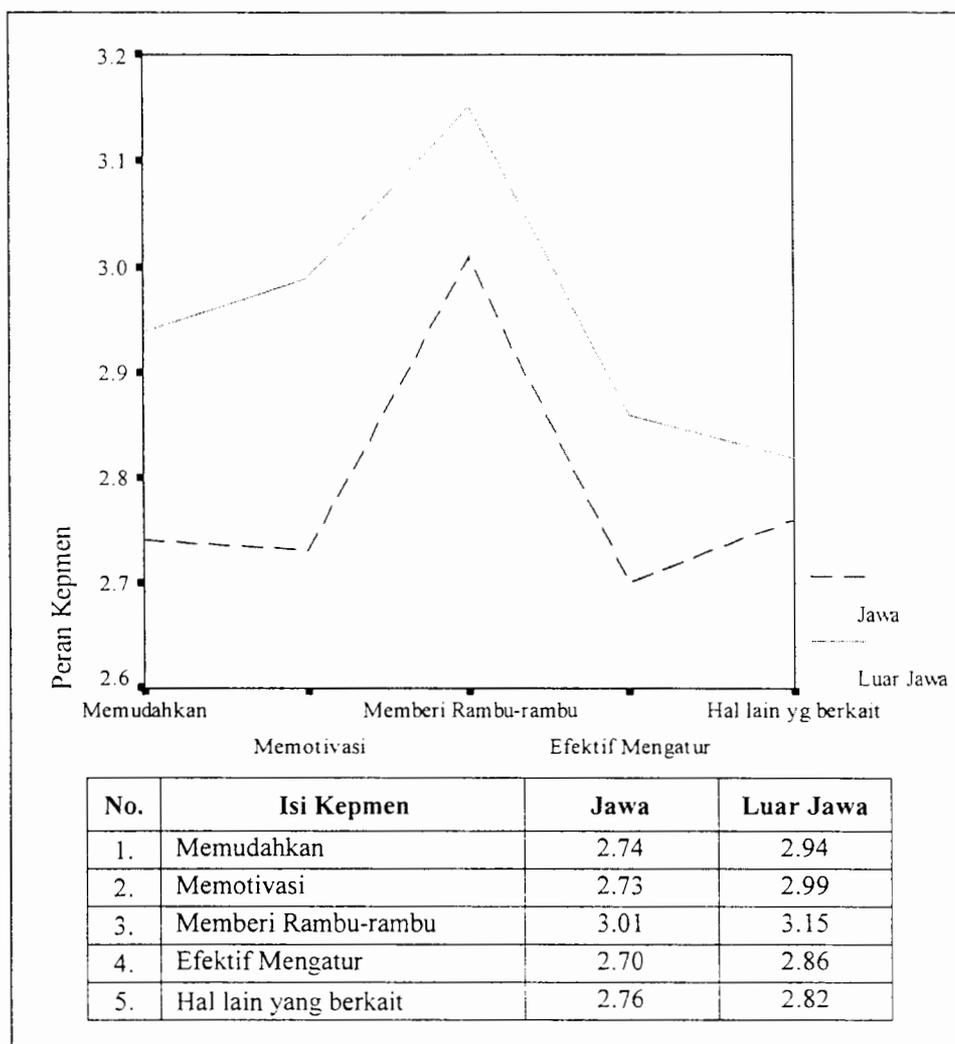


Sebagian besar para pengambil kebijakan di perguruan tinggi yang berjenis kelamin laki-laki memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi daripada yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini senada dengan perbedaan tingkat pemahaman antara pengelola perguruan tinggi yang belatar belakang eksakta dan non-eksakta. Keadaan semacam ini kemungkinan dikarenakan para pengambil kebijakan di perguruan tinggi yang berjenis kelamin laki-laki lebih mampu berfikir secara logis, realistis dan *to the point* dibanding yang berjenis kelamin perempuan, karena pada umumnya kaum wanita lebih mementingkan perasaannya dibanding rasionya menurut sementara kalangan.

D. Peran Kepmen No.107/U/2001 Dalam Membantu Perguruan Tinggi Tatap Muka Menyelenggarakan PTJJ

Item-item yang berkaitan dengan peran Kepmen No. 107/U/2001 terhadap rencana masing-masing perguruan tinggi menyelenggarakan PTJJ terdiri dari kategori memudahkan, memotivasi, memberi rambu-rambu, efektif mengatur dan hal lain yang terkait. Memudahkan artinya dengan membaca Kepmen, para pengambil kebijakan di perguruan tinggi memperoleh gambaran yang jelas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan PTJJ; memotivasi artinya dengan membaca Kepmen, para pengambil kebijakan di perguruan tinggi memperoleh kejelasan dan bersemangat untuk mulai mempertimbangkan penyelenggaraan PTJJ di perguruan tingginya; memberikan rambu-rambu artinya dengan membaca Kepmen, para pengambil kebijakan di perguruan tinggi memperoleh informasi teknis operasional tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan PTJJ; efektif mengatur artinya dengan membaca Kepmen, para pengambil kebijakan di perguruan tinggi memahami konsekwensi dari menyelenggarakan PTJJ, apa syarat-syaratnya dan apa konsekwensinya apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Untuk lebih rincinya hasil jajak pendapat tentang peran Kepmen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 8. Peranan Kepmen Terhadap Penyelenggaraan PTJJ Menurut Kategori Lokasi

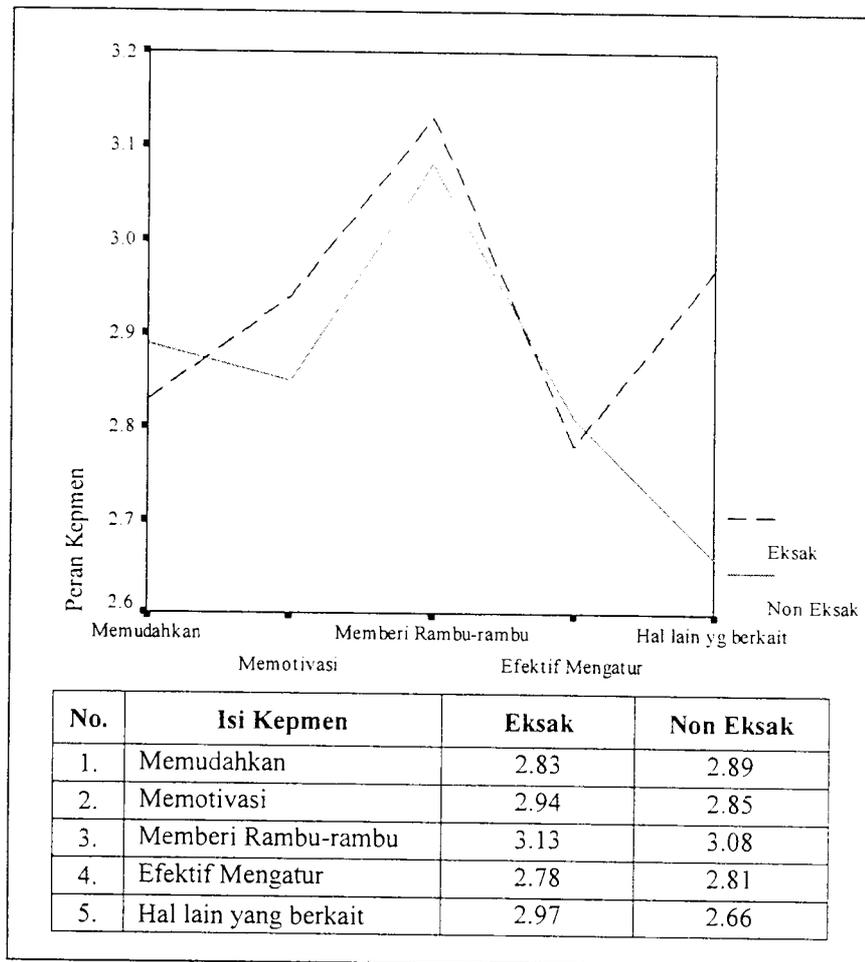


Apabila dibandingkan dengan pembahasan-pembahasan temuan penelitian dalam penelitian ini, yang dalam beberapa hal rata-rata menunjukkan dominasi Jawa atas luar Jawa, maka dalam hal peranan bagi penyelenggaraan PTJJ keadaannya terbalik. Artinya, respon dari para pengambil kebijakan di PT yang berlokasi di luar Jawa lebih baik dibanding respon para pengambil kebijakan dari Jawa. Hal ini menarik untuk dicermati karena dalam beberapa hal pemahaman para pengambil kebijakan di PT Jawa terhadap isi pada umumnya lebih baik daripada yang di luar Jawa tetapi dalam hal memandang peran terhadap penyelenggaraan PTJJ sebaliknya. Namun, secara umum terlihat tidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara responden dalam dan luar Jawa dalam memandang peran terhadap penyelenggaraan PTJJ.

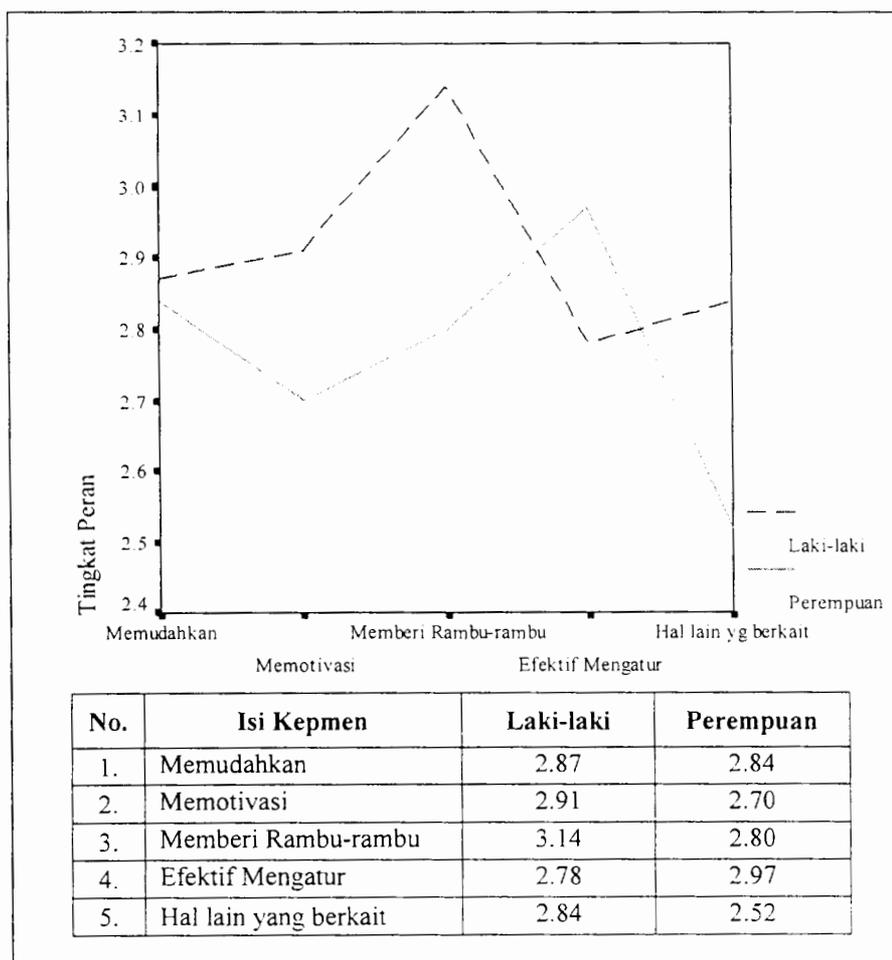
Selanjutnya, hasil penelitian tentang peran Kepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ ini dibandingkan berdasarkan kategori fakultas, gender, golongan dan jabatan struktural.

Pada Gambar 9 terlihat peranan Kepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ dilihat dari kategori fakultas. Data menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara pengambil kebijakan dari fakultas eksakta dan non eksakta didalam memandang peran Kepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ. Secara umum, peranan Kepmen masih dianggap sebagai informasi umum saja tentang PTJJ, belum memberikan aturan yang efektif tentang penyelenggaraan PTJJ. Namun, walaupun demikian terdapat pendapat yang sangat positif terhadap peran Kepmen sebagai pemberi rambu-rambu dalam penyelenggaraan PTJJ. Artinya, para pengambil kebijakan di perguruan tinggi, baik yang berlatar belakang eksakta maupun non eksakta, sama-sama memandang Kepmen di satu sisi dapat pula berperan dalam memberikan rambu-rambu kepada perguruan tinggi didalam menyelenggarakan PTJJ. Informasi serupa tentang peranan Kepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ juga didapatkan pada kategori gender. Untuk lebih rinci silakan lihat Gambar 9 dan 10 berikut.

Gambar 9. Peranan Kepmen Terhadap Penyelenggaraan PTJJ Menurut Kategori Fakultas



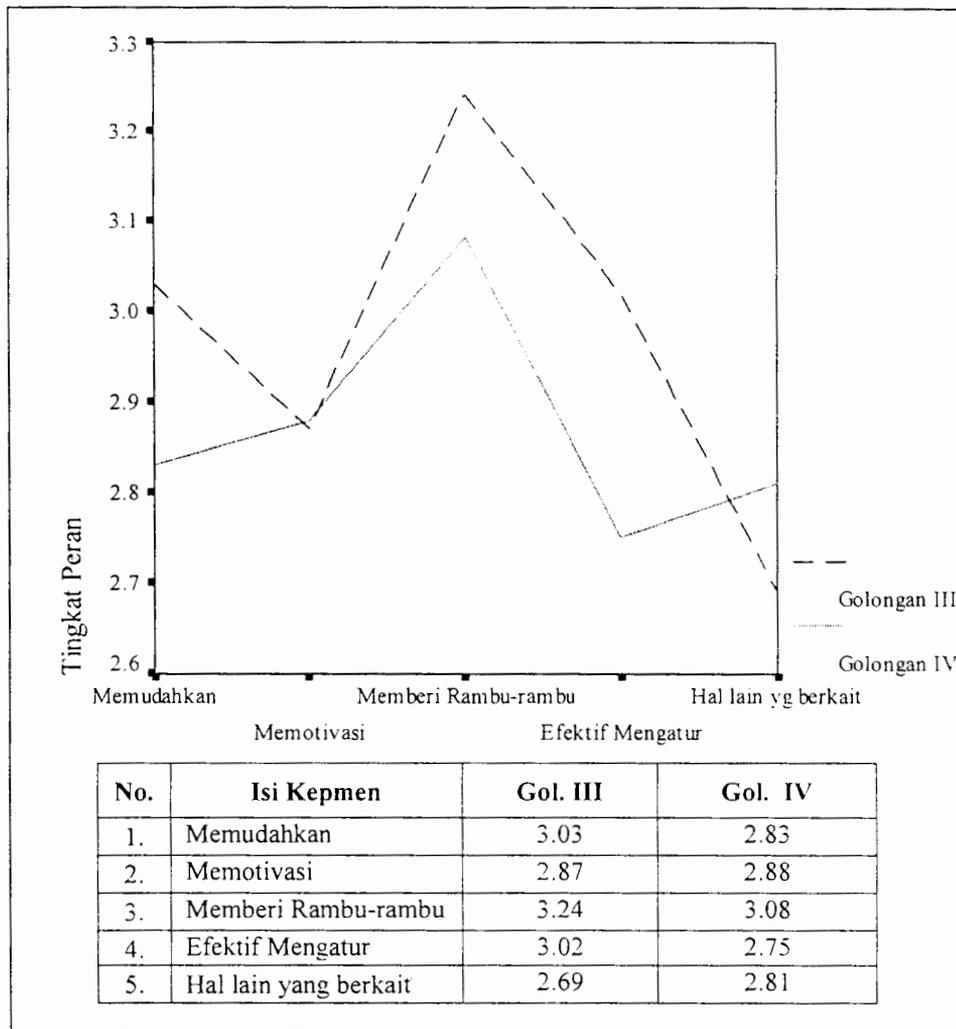
Gambar 10. Peranan Kepmen Terhadap Penyelenggaraan PTJJ Menurut Kategori Gender



Pada saat peranan Kepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ dilihat dari kategori golongan maka data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara golongan III dan golongan IV. Golongan III memandang Kepmen berperan sangat baik didalam memberikan informasi yang komprehensif tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan PTJJ. Hal ini ditunjukkan dengan nilai di atas 3 untuk tiga pernyataan tentang peranan Kepmen, yaitu memudahkan, memberi rambu-rambu dan efektif mengatur. Sementara golongan IV memandang Kepmen hanya sebagai pemberi informasi umum tentang penyelenggaraan PTJJ. Hal ini ditunjukkan oleh nilai yang rata-rata 2 untuk 4 dari 5 pernyataan tentang peran Kepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ, yaitu memudahkan, memotivasi, efektif mengatur, dan hal lain yang terkait. Hanya satu pernyataan yang nilainya 3, yaitu Kepmen dianggap berperan positif didalam

memberikan rambu-rambu penyelenggaraan PTJJ. Perbedaan pendapat yang signifikan ini kemungkinan dikarenakan pemahaman golongan IV terhadap isi Kepmen lebih baik daripada golongan III, sehingga pada saat ditanya tentang perannya, mereka masih melihat Kepmen tersebut belum memberikan rambu yang jelas tentang penyelenggaraan PTJJ. Data rinci tentang hal ini dapat dilihat pada Gambar 11 berikut.

Gambar 11. Peranan Kepmen Terhadap Penyelenggaraan PTJJ Menurut Kategori Golongan



Dilihat dari kategori jabatan struktural, yaitu pengambil kebijakan di PT pada level rektorat, fakultas dan jurusan, terlihat pendapat yang bervariasi tentang peran Kepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ. Pada level rektorat, mengemuka pendapat yang setuju dengan pernyataan bahwa Kepmen memiliki peran memudahkan, memberi rambu-

rambu, dan hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan PTJJ. Artinya, dengan membaca Kepmen tersebut para pengambil kebijakan di tingkat rektorat memiliki informasi umum, rambu-rambu yang jelas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan PTJJ. Sehingga pada saat perguruan tinggi mereka berniat menyelenggarakan PTJJ, mereka sudah memahami apa saja syarat-syarat yang perlu dipersiapkan dan dipenuhi. Dua peran lain dari Kepmen yang tidak begitu nampak menurut mereka adalah peran didalam memotivasi dan mengatur dengan efektif penyelenggaraan PTJJ apabila suatu saat nanti perguruan tinggi mereka menyelenggarakan PTJJ. Padahal ke dua peran tersebut sangat penting didalam memberi kepercayaan diri bagi mereka sebagai pengelola PTJJ.

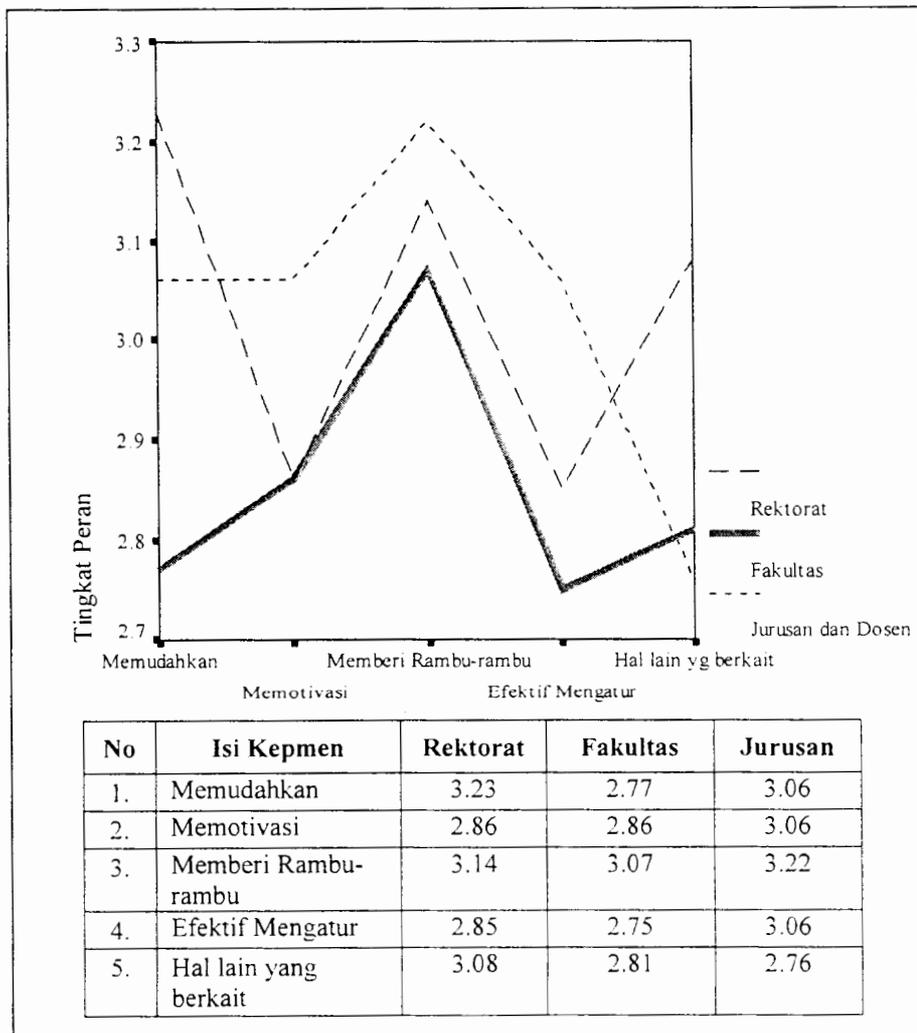
Para pengambil kebijakan di tingkat fakultas nampaknya lebih pesimis didalam memandang peran Kepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ ini. Dari lima pernyataan tentang peran Kepmen, yaitu memudahkan, memotivasi, memberi rambu-rambu, efektif mengatur, dan hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan PTJJ, hanya satu peran yang menurut mereka mencerminkan peran Kepmen didalam penyelenggaraan PTJJ, yaitu berperan didalam memberi rambu-rambu. Artinya, dengan membaca Kepmen tersebut, para pengambil kebijakan di tingkat fakultas belum mendapatkan informasi yang komprehensif tentang penyelenggaraan PTJJ, yang semestinya mudah dipahami, memotivasi, memberikan rambu-rambu yang jelas, serta efektif mengatur proses penyelenggaraan PTJJ di perguruan tinggi mereka. Dalam kenyataannya, Kepmen tersebut baru sebatas memberikan rambu-rambu umum saja tentang penyelenggaraan PTJJ. Pendapat para pengambil kebijakan di tingkat fakultas yang cenderung pesimis ini nampaknya dilatarbelakangi oleh peran mereka sebagai pengembang program, yang justru memerlukan petunjuk teknis yang lebih operasional daripada hanya sekedar rambu-rambu umum saja.

Pendapat para pengambil kebijakan di jurusan tentang peran Kepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ menarik untuk dikaji, karena mereka nampaknya lebih optimis dibanding seniornya di tingkat fakultas. Para pengambil kebijakan di tingkat jurusan ini berpendapat bahwa Kepmen berperan dalam memberi kemudahan, memotivasi, memberi rambu-rambu, dan mengatur dengan efektif penyelenggaraan PTJJ. Mereka yakin

dengan menggunakan Kepmen tersebut akan mudah bagi mereka menyelenggarakan PTJJ.

Bila dirangkum maka terdapat pendapat yang beragam antara pengambil kebijakan di tingkat rektorat, fakultas dan jurusan tentang peran Kepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ. Hal ini menunjukkan bahwa Kepmen belum berperan secara optimal didalam memandu perguruan tinggi menyelenggarakan PTJJ. Nampaknya perguruan tinggi masih membutuhkan petunjuk teknis yang lebih operasional tentang penyelenggaraan PTJJ daripada hanya sekedar Kepmen. Data rinci tentang pendapat para pengambil kebijakan di perguruan tinggi mengenai peran Kepmen ini dapat dilihat pada Gambar 12 berikut.

Gambar 12. Peranan Kepmen Terhadap Penyelenggaraan PTJJ Menurut Kategori Struktural

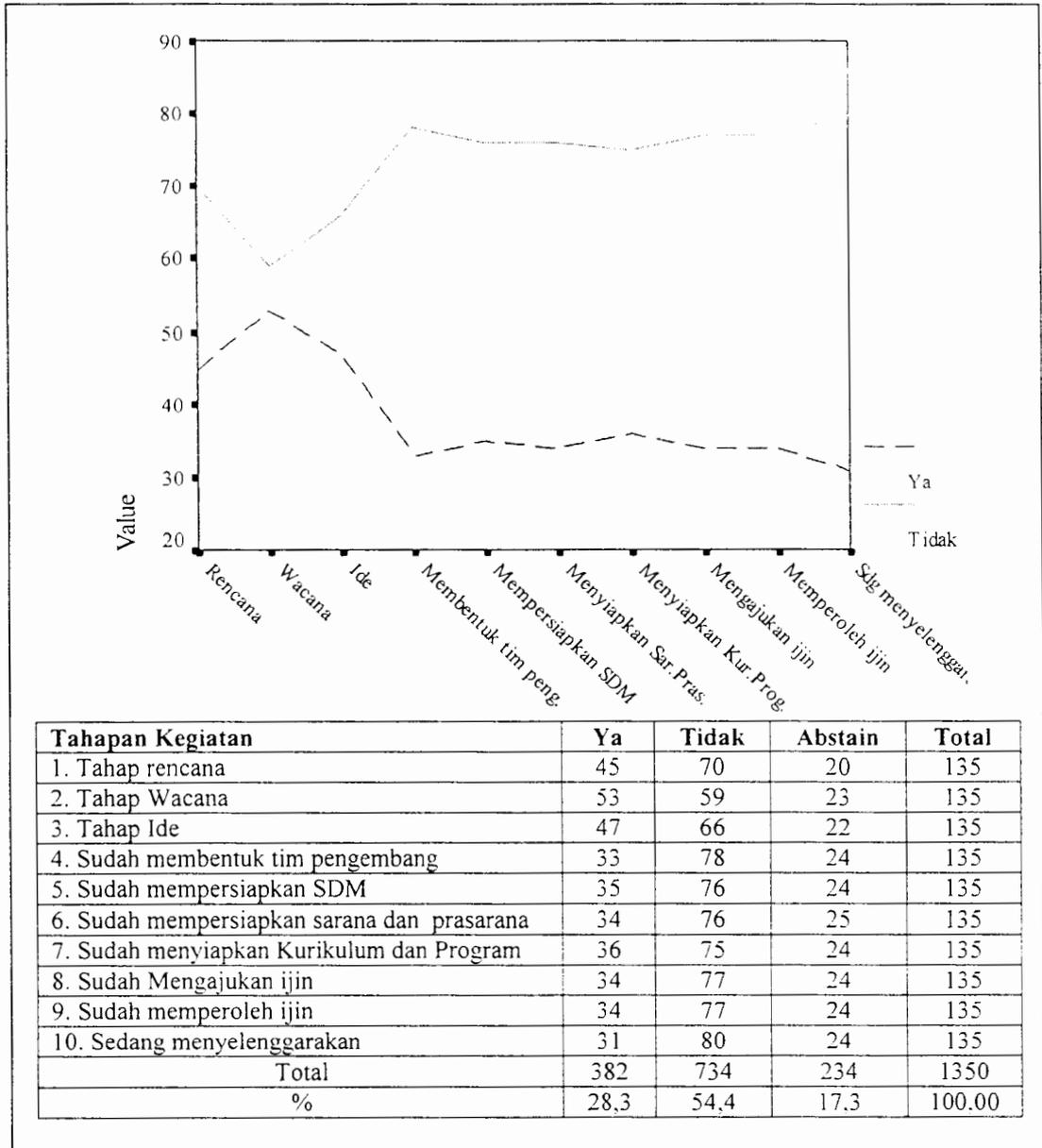


E. Rencana Perguruan Tinggi Tatap Muka Menyelenggarakan PTJJ

Bila kita perhatikan tabel 13 di bawah ini sekilas tergambar bahwa sebagian besar perguruan tinggi tidak memiliki rencana untuk menyelenggarakan PTJJ. Hal ini didukung oleh data sekitar 71,7% perguruan tinggi mengatakan tidak dan tidak berpendapat dan hanya sekitar 28,3 % saja yang mengatakan memiliki rencana menyelenggarakan PTJJ. Hal ini menunjukkan ketidaksiapan perguruan tinggi menyelenggarakan PTJJ. Ketidaksiapan ini dapat dikarenakan ketidaktahuan atau karena tahu segala konsekwensinya maka mereka merasa tidak siap untuk memenuhi segala persyaratan penyelenggaraan PTJJ.

Dari kelompok perguruan tinggi yang menyatakan memiliki rencana menyelenggarakan PTJJ, pada umumnya rencana tersebut baru sebatas tahap rencana, wacana dan ide. Hal tersebut ditunjukkan dengan data yang terdapat dalam tabel, yaitu rerata 12,65%. Sementara sisanya, rerata 6,82%, menyatakan memiliki rencana yang lebih dari sekedar rencana, ide dan wacana. Data ini lagi-lagi menunjukkan ketidak siapan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan PTJJ, karena walaupun mengatakan memiliki rencana, tetapi baru sebatas rencana itu sendiri, wacana dan ide tentang penyelenggaraan PTJJ, belum sampai tahap operasionalnya.

Gambar 13. Rencana PT menyelenggarakan PTJJ



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang pemahaman para pengambil kebijakan di PT terhadap isi Kepmen No.107/U/2001 diperoleh potret sebagai berikut.

1. Kepmen hanya dimiliki oleh setengah dari responden yang diteliti (Ya: 58,51%; Tidak: 41,49%).
2. Hanya setengah dari responden yang peduli terhadap Kepmen no.107/U/2001 (Ya: 56,30%; Tidak: 43,70%)
3. Isi Kepmen dipahami dengan baik oleh sekitar 60,41% responden, yang tidak memahami sekitar 39,59%
4. Dari 14 item isi Kepmen, 9 item dipahami dengan baik, 5 item kurang dipahami. Sembilan item isi Kepmen yang dipahami dengan baik adalah tujuan, syarat penyelenggaraan, penyelenggaraan, kurikulum, materi ajar, media dan metode, konsep belajar mandiri, evaluasi hasil belajar, dan layanan bantuan belajar dalam PTJJ. Lima item yang kurang dipahami adalah pengertian, praktek dan praktikum, pemantapan pengalaman lapangan, dan unit sumber belajar dalam PTJJ.
5. Tidak terdapat perbedaan pemahaman yang signifikan antara pengambil kebijakan di tingkat rektorat, fakultas, dan jurusan terhadap isi Kepmen. Namun terlihat kecenderungan penurunan tingkat pemahaman dari pengambil kebijakan berdasarkan tingkat rektorat, fakultas, dan tingkat jurusan.
6. Tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan dalam hal pemahaman terhadap isi Kepmen antar kategori responden, seperti jabatan struktural (rektorat, fakultas, jurusan), golongan (III dan IV), fakultas (eksakta dan non eksakta), lokasi PT (Jawa dan Luar Jawa), serta kategori gender (laki-laki dan perempuan). Tapi ditemukan kecenderungan penurunan tingkat pemahaman antar responden dalam satu kategori, misal golongan IV lebih tinggi tingkat pemahamannya dibanding dengan golongan III, eksak lebih tinggi dibanding non-eksak, dan pria lebih tinggi dibanding wanita, responden yang berasal dari PT di Jawa dan luar Jawa
7. Diperoleh pendapat yang beragam tentang peranan Kepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ.

8. Tidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan didalam memandang Kepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ antara responden yang dikategorikan berdasarkan lokasi (Jawa dan luar Jawa), fakultas (eksak dan non eksak), dan gender (laki-laki dan perempuan).
9. Responden bergolongan III berpendapat bahwa Kepmen memberikan informasi yang baik dalam hal memberi kemudahan, memberi rambu-rambu, dan mengatur dengan efektif penyelenggaraan PTJJ. Golongan IV sebaliknya, mereka berpendapat bahwa Kepmen hanya memberikan rambu-rambu saja tentang penyelenggaraan PTJJ, lain tidak.
10. Pendapat responden tentang peran Kepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ dilihat dari jabatan struktural sangat beragam, bahkan cenderung terbolak balik. Responden pada tingkat jurusan nampak lebih optimis daripada responden tingkat rektorat dan fakultas. Responden yang paling pesimis dalam memandang peran Kepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ adalah responden pada tingkat fakultas.
11. Sebagian besar PT (71,70%) mengatakan tidak memiliki rencana menyelenggarakan PTJJ. Dari PT yang menyatakan memiliki rencana menyelenggarakan PTJJ, rencananya tersebut baru sebatas tahapan rencana itu sendiri, tahapan wacana dan ide. Belum ada PT yang betul-betul serius berminat menyelenggarakan PTJJ.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan untuk meningkatkan pemahaman para pengambil kebijakan di PT terhadap isi Kepmen no. 107/U/2001 tentang pedoman penyelenggaraan PTJJ serta untuk menghindari praktek kelas jauh di masa datang, maka disarankan dilakukan hal-hal berikut.

- Visitasi ke beberapa PT responden untuk memvalidasi data hasil penelitian
- Sosialisasi dan diseminasi Kepmen tentang pedoman penyelenggaraan PTJJ kepada seluruh jajaran PT, tidak hanya pada tingkat rektorat saja.
- Sosialisasi dan diseminasi Kepmen harus diikuti dengan dengar pendapat atau diusi yang lebih mendalam tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan PTJJ dengan pejabat terkait yang kompeten di bidangnya.

- Perlu dikembangkan pedoman teknis operasional, yang memandu PT menyelenggarakan PTJJ, selain Kepmen yang sudah ada.
- Harus jelas *reward dan punishment* dan *law enforcement* dalam hal penyelenggaraan PTJJ yang berkualitas dan bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

1. Belawati, T. (ed). (1999). *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Jakarta: Universitas Terbuka.
2. Belawati, T. (2002). *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh*. Jakarta : PAU-PPAI, Universitas Terbuka.
3. Keegan, D. (1980). *On Defining Distance Education*. *Distance Education*, 1 (1), 13-26.
4. Keegan, D. (1986). *The Foundations of Distance Education*. London: Croom Helm.
5. MacKenzie, Norman; Postage, Richmond; and Scupham, John. (1975). *Open Learning: System and Problems in Post Secondary Education*. Paris: UNESCO.
6. Moore, M.G. (1973). *Toward a Theory of Independent Learning and Teaching*. *Journal of Higher Education*, 44, 66 -79.
7. Moore, M.G. and Kearsley, G. (1996). *Distance Education: A System View*. Toronto: Wadsworth Publishing
8. Motik, Indaryati Swarna Dewi (1989). *A Case Study of The Tutorial Program at The Jakarta Regional Office of Universitas Terbuka*. Disertasi untuk meraih gelar Doktor dalam Teknologi Pendidikan. New York State: Syracuse University
9. Puspitasari, K.A.(2002). *Layanan Bantuan Belajar Dalam Sistem Belajar Jarak Jauh*. Jakarta : PAU-PPAI, Universitas Terbuka.
10. Rowntree, D. (1993). *Teach Yourself With Open Learning*. London : Kogan Page Ltd.
11. Schram, Wilbur. (1977). *Big Media, Little Media*. Beverly Hills: Sage
12. Sherry, L. (1996). *Issues In Distance Education*. *Instructional Journal of Educational Technology*, I (4), 337-365.
13. Suparman, A. (1996). *Pendidikan Jarak Jauh*. Jakarta : PAU-PPAI, Universitas Terbuka.

LAMPIRAN

KUESIONER

**PEMAHAMAN PARA PENGAMBIL KEBIJAKAN
DI PERGURUAN TINGGI**

terhadap

KEPUTUSAN MENDIKNAS No. 107/U/2001

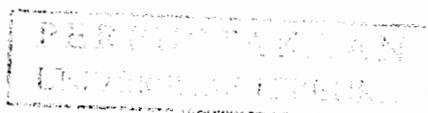
tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

PTJJ (PTJJ)

UNIVERSITAS TERBUKA

Jakarta, 2002



PENGANTAR

Yth. Bapak/Ibu Responden penelitian ini.

Program PTJJ merupakan sistem pendidikan yang diterapkan Universitas Terbuka sejak tahun 1984. Selama sepuluh tahun pertama perjalanannya, UT mendapatkan keistimewaan dari pemerintah sebagai satu-satunya perguruan tinggi yang diizinkan menerapkan sistem pendidikan jarak jauh. Namun, pada tahun-tahun berikutnya mulai ada PT lain yang mencoba menerapkan sistem pendidikan serupa, dan hal ini berlangsung terus sampai sekarang tanpa ada aturan yang jelas yang mengaturnya.

Untuk mengatur penyelenggaraan “program pendidikan jarak jauh” yang akhir-akhir marak dilaksanakan oleh beberapa PT, Menteri Pendidikan Nasional-RI mengeluarkan Surat Keputusan No. 107/U/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program PTJJ.

Kepmen tersebut sudah disebarakan ke seluruh PTN, PTS dan pihak-pihak terkait sejak bulan Juli 2001, tetapi penelitian tentang tingkat pemahaman para pimpinan PT dan pihak-pihak terkait terhadap isi Kepmen tsb belum pernah dilakukan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian dan fokus utama dalam penelitian ini adalah pemahaman Bapak/Ibu terhadap Kepmen No. 107/U/2001 tersebut.

Silakan utarakan pendapat dan kesan Bapak/Ibu sejujur-jujurnya karena tidak ada salah dan benar dalam kuesioner ini. Pendapat yang berbeda-beda sangat kami hargai. Penelitian ini tidak akan berpengaruh terhadap status Bapak/Ibu sebagai pimpinan PT, maupun terhadap PT Bapak/Ibu.

Pendapat dan kesan Bapak/Ibu dalam kuesioner ini hanya diketahui oleh peneliti dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Setelah selesai mengisi, mohon kuesioner ini dimasukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan. Tutup rapat amplop yang berisi kuesioner ini, kemudian dikirimkan kembali kepada kami melalui pos, dengan lokasi yang sudah tertera dalam amplop.

Kami sangat berterima kasih atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu.

Jakarta, Mei 2002

Tim Peneliti UT

DATA RESPONDEN

N a m a : L/P *)
Tanggal Lahir :
Lokasi :
.....
Telp/Fax :
E-mail :
Universitas/Institut/Akademi/Sekolah Tinggi *) :
.....
Fakultas :
Jurusan :
Jabatan Struktural :
Jabatan Fungsional :
Pangkat/Gol :
Pengalaman Mengajar: tahun.....

***) pilih salah satu**

Bubuhkan tanda (X) pada salah satu pilihan jawaban yang terdapat pada setiap pernyataan berikut sesuai dengan pemahaman Anda

I. Keberadaan Kepmen No. 107/U/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTJJ

1. Apakah Anda memiliki dokumen Kepmen No.107/U/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTJJ? Ya/Tidak
2. Darimana Anda mendapatkan informasi tentang Kepmen No.107/U/2001 tersebut?
 Dari :
 - Mendiknas
 - Dirjen DIKTI
 - Dir PAK- DIKTI
 - Pejabat PT sendiri
 - Pejabat PT lain
 - Kolega
 - Orang lain
3. Apakah Anda telah membaca Kepmen No.107/U/2001? Ya/Tidak
4. Apakah Anda peduli dengan Kepmen No.107/U/2001? Ya/Tidak

II. Kejelasan Pedoman Penyelenggaraan PTJJ dalam Kepmen No. 107/U/2001

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. Pengertian PTJJ dalam Kepmen No.107/U/2001 mudah dipahami | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. Penyelenggaraan program PTJJ sama dengan PT tatap muka | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. Penjelasan tentang pengertian Materi Ajar dalam PTJJ mudah dipahami | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. Materi Ajar dalam PTJJ unik, karena dikemas untuk proses belajar mandiri | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. Materi Ajar dalam PTJJ dikemas dalam bentuk media cetak dan non cetak | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. Penjelasan tentang pengertian Belajar Mandiri dalam Kepmen No.107/U/2001 mudah dipahami | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. Belajar Mandiri adalah belajar atas inisiatif dari mahasiswa sendiri | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. Belajar Mandiri dapat dilakukan oleh mahasiswa secara sendiri dan berkelompok | 1 | 2 | 3 | 4 |

13. Penjelasan tentang pengertian Bantuan Belajar dalam Kepmen No.107/U/2001 mudah dipahami	1	2	3	4
14. Bantuan Belajar dalam PTJJ dapat berupa pelayanan akademik, pelayanan administrasi dan pelayanan pribadi	1	2	3	4
15. Pelayanan Akademik dalam PTJJ dapat berupa tutorial	1	2	3	4
16. Tutorial dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka dan jarak jauh	1	2	3	4
17. Pelayanan Administrasi dalam PTJJ dapat berupa pemberian informasi tentang ujian, registrasi, cara memperoleh bahan ajar, jadwal tutorial, dll.	1	2	3	4
18. Pelayanan Pribadi dalam PTJJ antara lain dapat berupa konsultasi tentang cara belajar, cara mendapatkan sumber pustaka, dll.	1	2	3	4
19. Penjelasan tentang pengertian Evaluasi Hasil Belajar dalam Kepmen No.107/U/2001 mudah dipahami	1	2	3	4
20. Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa dalam PTJJ pada prinsipnya sama dengan evaluasi hasil belajar mahasiswa pada PT tatap muka	1	2	3	4
21. Evaluasi Hasil Belajar mahasiswa dalam PTJJ adalah penilaian yang dilakukan terhadap proses belajar mahasiswa, yang dilakukan secara tatap muka dan jarak jauh	1	2	3	4
22. Evaluasi Hasil Belajar dengan cara tatap muka adalah evaluasi yang dilakukan dengan pengawasan	1	2	3	4
23. Evaluasi Hasil Belajar dengan cara jarak jauh dilakukan terhadap tugas yang dikerjakan mahasiswa secara mandiri	1	2	3	4
24. Penjelasan tentang pengertian Praktik dalam Kepmen No.107/U/2001 mudah dipahami	1	2	3	4
25. Praktik dalam PTJJ adalah sama dengan praktik dalam PT tatap muka	1	2	3	4
26. Praktik dalam PTJJ adalah latihan penerapan teori oleh mahasiswa yang dilakukan dengan pengawasan langsung	1	2	3	4
27. Penjelasan tentang pengertian Praktikum dalam Kepmen No.107/U/2001 mudah dipahami	1	2	3	4
28. Praktikum dalam PTJJ sama dengan praktikum pada PT tatap muka	1	2	3	4
29. Praktikum dalam PTJJ adalah tugas yang terkendali, yang berhubungan dengan validasi fakta dan hubungan antar fakta	1	2	3	4

30. Penjelasan tentang pengertian Pemantapan Pengalaman Lapangan dalam Kepmen No.107/U/2001 mudah dipahami 1 2 3 4
31. Pemantapan Pengalaman Lapangan yang dilakukan dalam PTJJ sama dengan pemantapan pengalaman lapangan pada PT tatap muka 1 2 3 4
32. Pemantapan Pengalaman Lapangan adalah tugas yang dilakukan oleh mahasiswa dalam lingkungan kerja yang sebenarnya 1 2 3 4
33. Pemantapan Pengalaman Lapangan adalah tugas yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pengawasan langsung 1 2 3 4
34. Penjelasan tentang pengertian Unit Sumber Belajar dalam Kepmen No.107/U/2001 mudah dipahami 1 2 3 4
35. Unit Sumber Belajar dalam PTJJ adalah pelaksana penyelenggara program PTJJ yang ada, baik di kantor pusat maupun di daerah 1 2 3 4
36. Unit Sumber Belajar terdapat baik dalam sistem PTJJ maupun dalam PT tatap muka 1 2 3 4
37. Penjelasan tentang Tujuan Program PTJJ dalam Kepmen No.107/U/2001 mudah dipahami 1 2 3 4
38. Tujuan Program PTJJ sama dengan tujuan program pendidikan PT tatap muka 1 2 3 4
39. Penjelasan tentang Penyelenggaraan Program PTJJ dalam Kepmen No.107/U/2001 mudah dipahami 1 2 3 4
40. Penyelenggaraan Program PTJJ mengutamakan penggunaan berbagai media komunikasi dan metode pembelajaran interaktif 1 2 3 4
41. Media Komunikasi yang digunakan dalam program PTJJ adalah media cetak yang dikombinasikan dengan media lain 1 2 3 4
42. Metode Pembelajaran Interaktif yang digunakan dalam program PTJJ didasarkan pada konsep belajar mandiri 1 2 3 4
43. Program PTJJ dapat diselenggarakan oleh semua PT asal memenuhi persyaratan 1 2 3 4
44. Program PTJJ dapat diselenggarakan oleh PT yang memiliki sumber daya untuk mengembangkan dan memutakhirkan bahan ajar mandiri 1 2 3 4

45. Program PTJJ dapat diselenggarakan oleh PT yang memiliki sumber daya untuk mengelola sistem PTJJ	1	2	3	4
46. Program PTJJ dapat diselenggarakan oleh PT yang memiliki sumber daya bagi pelaksanaan praktikum yang dapat diakses oleh mahasiswa	1	2	3	4
47. Program PTJJ dapat diselenggarakan oleh PT yang memiliki sumber daya bagi pelaksanaan pementapan pengalaman lapangan mahasiswa	1	2	3	4
48. Program PTJJ dapat diselenggarakan oleh PT yang memiliki sumber daya yang dapat melakukan evaluasi hasil belajar secara terprogram dan berkala minimal 2 kali per semester	1	2	3	4
49. Program PTJJ dapat diselenggarakan oleh PT yang memiliki sumber daya dalam bidang manajemen PTJJ dan pembelajaran jarak jauh	1	2	3	4
50. Program PTJJ dapat diselenggarakan oleh PT yang memiliki sumber daya yang mampu mengorganisasikan unit sumber belajar	1	2	3	4
51. Program PTJJ dapat diselenggarakan oleh PT yang mempunyai izin penyelenggaraan program studi tatap muka dalam bidang studi yang sama dan telah diakreditasi oleh BAN-PT dengan nilai A atau U	1	2	3	4
52. Kurikulum Program PTJJ sama dengan kurikulum PT tatap muka	1	2	3	4
53. Beban Studi Program Studi dalam PTJJ sama dengan PT tatap muka	1	2	3	4
54. Proses Pembelajaran dalam PTJJ dilakukan secara terstruktur	1	2	3	4

III. Peranan Kepmen No.107/U/2001 dalam membantu PT untuk menyelenggarakan program PTJJ

55. Kepmen 107/U/2001 memudahkan PT yang berminat untuk membuka program PTJJ	1	2	3	4
56. Kepmen 107/U/2001 memotivasi PT yang berminat untuk membuka program PTJJ	1	2	3	4
57. Kepmen 107/U/2001 memberikan rambu-rambu yang jelas tentang syarat dan prosedur pembukaan program PTJJ	1	2	3	4
58. Kepmen 107/U/2001 efektif mengatur penyelenggaraan program PTJJ di tanah air	1	2	3	4

59. Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan PTJJ mencakup isi Kepmen No.107/U/2001

1 2 3 4

IV. Rencana PT untuk menyelenggarakan PTJJ

Perguruan Tinggi tempat saya bekerja,

- | | |
|--|----------|
| 60. sudah mempunyai rencana membuka program PTJJ | Ya/Tidak |
| 61. mempunyai rencana untuk menyelenggarakan PTJJ, tetapi baru pada tahap wacana. | Ya/Tidak |
| 62. sudah mempunyai ide untuk membuka program PTJJ | Ya/Tidak |
| 63. sudah membentuk tim pengembangan program PTJJ | Ya/Tidak |
| 64. sudah mempersiapkan sumber daya untuk penyelenggaraan program PTJJ | Ya/Tidak |
| 65. sudah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan program PTJJ | Ya/Tidak |
| 66. sudah menyiapkan kurikulum dan program studi yang dapat dilaksanakan dengan sistem pendidikan jarak jauh | Ya/Tidak |
| 67. sudah mengajukan izin untuk menyelenggarakan PTJJ ke DIKTI | Ya/Tidak |
| 68. sudah mendapat ijin untuk membuka program PTJJ | Ya/Tidak |
| 69. sedang menyelenggarakan PTJJ | Ya/Tidak |

*Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak/Ibu
Yang telah berkenan meluangkan waktunya
Untuk mengisi kuesioner ini.*

*Semoga jerih payah kita ini dapat mewarnai pembenahan sistem pendidikan nasional
kita, Amin.*

DAFTAR PERGURUAN TINGGI RESPONDEN

No.	Nama	Status	Lokasi
1.	Universitas Syah Kuala	PTN	Luar Jawa
2.	Universitas Riau	PTN	Luar Jawa
3.	Universitas Lampung	PTN	Luar Jawa
4.	Universitas Soedirman	PTN	Jawa
5.	Universitas Negeri Semarang	PTN	Jawa
6.	Universitas Brawijaya	PTN	Jawa
7.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	PTN	Jawa
8.	Universitas Jember	PTN	Jawa
9.	Universitas Udayana	PTN	Luar Jawa
10.	Universitas Cendana	PTN	Luar Jawa
11.	Universitas Tanjung Pura	PTN	Luar Jawa
12.	Universitas Hasanudin	PTN	Luar Jawa
13.	Universitas Tadulako	PTN	Luar Jawa
14.	Universitas Sumatera Utara	PTN	Luar Jawa
15.	Universitas Nomensen	PTS	Luar Jawa
16.	Universitas Bung Hatta	PTS	Luar Jawa
17.	Universitas Padjadjaran	PTN	Jawa
18.	Universitas Parahiyangan	PTS	Jawa
19.	Universitas Gajah Mada	PTN	Jawa
20.	Universitas Negeri Malang	PTN	Jawa
21.	Universitas Merdeka Malang	PTS	Jawa
22.	Universitas Kristen Petra	PTS	Jawa
23.	Universitas Samratulangi	PTN	Luar Jawa
24.	Universitas Mulawarman	PTN	Luar Jawa
25.	Universitas Widya Mahakam	PTS	Luar Jawa